

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH (STUDI PADA SARANA & PRASARANA PASAR MILIK
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Starata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**Naya Farisya
177110297**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-NYA serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan usulan penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana & Prasarana pasar milik pemerintah kota pekanbaru)".

Kemudian sholawat dan salam saya haturkan untuk junjungan alam baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma Solli a'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasullulah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam proses studi maupun dalam proses penulisan penyelesaian usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut memberikan semangat, dukungannya, dan membantu penulis. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembar ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syarinaldi, S.H., M.CI karena penulis kuliah di Universitas Islam Riau ini, telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik yang juga memberikan motivasi membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
5. Pembimbing Bapak Herman, S. Sos., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Rekan-rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik, memberikan arahan, dan memberikan dorongan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
8. Terkhususnya untuk Ayahanda AbuZardi Fari dan Ibunda tercinta Yusda Yenti yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan arahan dan motivasi penulis untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.

9. Kepada Adik-adikku Iqbal Zardi Fari dan Ilham GustaFari yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Sahabat-sahabatku Putri Silvia, Nahdayatul Cintia, Siti Hawa, Fitria, Affirsta Friski Ayunda, Elisa dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta dukungan materil maupun non materil dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan semua Mahasiswa Adminsitration Publik kelas C angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.

Naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan penelitian ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk membantu Usulan Penelitian Adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR.....	22
A. Studi kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi	22
2. Konsep Organisasi	26
3. Konsep Manajemen	28
4. Konsep Kebijakan Publik	30
5. Konsep Evaluasi	35
6. Konsep Sampah	40
B. Kerangka Pikir.....	42

C. Konsep Operasional.....	43
D. Operasional Variabel	44
E. Teknik Pengukuran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Teknik Penarikan Sampel.....	50
E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknis Analisis Data.....	51
H. Jadwal Penelitian	52
I. Rencana Sistematis Laporan	53
BAB IV DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	55
B. Visi-Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	57
C. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	58
D. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Responden.....	67
1. Tingkat Usia.....	67
2. Jenis Kelamin.....	69
3. Tingkat Pendidikan.....	71
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	73
1. Input.....	71

2. Output	81
3. Outcome.....	90
4. Benefit.....	99
5. Impact	106
C. Rekapitasi Dari Indikator-Indikator Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru	114
D. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru.....	121
BAB VI PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Data Daftar Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Buruh Angkut dan Buruh Kebersihan/Penyapu Pasar Kota Pekanbaru 10
1.2	Data Jumlah Tempat Sampah Yang Ada di Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru 13
II.1	Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 45
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian 49
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 52
V. 1	Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Usia 67
V. 2	Identitas Responden Buruh Kebersihan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Usia 67
V. 3	Identitas Responden Pedagang Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Usia 68
V. 4	Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Jenis Kelamin 68
V. 5	Identitas Responden Buruh Kebersihan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang

	Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
V. 6	Identitas Responden Pedagang Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
V. 7	Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
V. 8	Identitas Responden Buruh Kebersihan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
V. 9	Identitas Responden Pedagang Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
V. 10	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Indikator Input Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	72
V. 11	Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Indikator Input Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	75
V. 12	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Input Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	78

- V. 13 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Indikator Output Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 81
- V. 14 Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Indikator Output Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 84
- V. 15 Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Output Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)..... 87
- V. 16 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Indikator Outcome Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 90
- V. 17 Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Indikator Outcome Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 92
- V. 18 Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Outcome Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 95
- V. 19 Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Indikator Benefit Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)97
- V. 20 Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Indikator Benefit Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

	Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)	99
V. 21	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Benefit Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	102
V. 22	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Indikator Impact Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)	104
V. 23	Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Indikator Impact Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)	107
V. 24	Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Indikator Impact Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	110
V. 25	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)	113
V. 26	Rekapitulasi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru).....	115
V. 27	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1	Standar Operasional Prosedur Penyapuan Pasar..... 11
I.2	Penampakan Masih Adanya Kesadaran Pedagang Meletakkan Tempat Sampah di Depan Kios..... 13
I.3	Tempat Pembuangan Sementara di Pasar (TPS)..... 14
I.4	Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kota Pekanbaru..... 17
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 42
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru..... 66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner untuk responden Aparatur Dinas terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru..... 132
2. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.... 137
3. Daftar Kuesioner untuk responden pedagang terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru 138
4. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pedagang dan Buruh Kebersihan di Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru 143
5. Rekapitulasi Telly Kuisisioner tanggapan Responden Aparatur Dinas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)..... 144
6. Rekapitulasi Telly Kuisisioner tanggapan Responden Buruh Kebersihan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru)..... 145
7. Rekapitulasi Telly Kuisisioner tanggapan Responden Pedagang Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 146
8. Dokumentasi Foto Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Kota Pekanbaru) 148
9. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 152
10. Surat Rekomendasi Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 153
11. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 154

- + 70% v


Nama	: Naya Farisya
NPM	: 177110297
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata (S1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila ia kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sabagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Penulis


Naya Farisya

xv

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH (STUDI PADA SARANA & PRASARANA PASAR MILIK
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh
Naya Farisyah

Penelitian ini untuk Menganalisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru), indikator penilaian yang digunakan meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak). Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan kuesioner ini kemudian dijadikan bahan baku untuk menganalisis kondisi empiris dan objektivitas keberadaan tujuan lokasi penelitian, apaan populasi dan sampel penelitian ini berjumlah 53 orang, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan teknik daftar kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan observasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peneliti ini dari sisi aparatur dinas bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru) yaitu “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dilihat dari sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah dalam menyediakan Sarana dan Prasarana di pasar milik pemerintah kota pekanbaru sudah cukup terlaksanakan dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang pedagang dan buruh kebersihan sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada pedagang dan buruh kebersihan, hal ini juga agar dapat membantu pedagang dan buruh kebersihan menjadi lebih tahu bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan sampah. Namun kegiatan pengelolaan sampah mengenai sarana dan prasarana belum berjalan dengan maksimalnya.

Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 08 YEAR 2014 CONCERNING WASTE MANAGEMENT (STUDY ON MARKET INFRASTRUCTURE OWNED THE GOVERNMENT OF PEKANBARU CITY)

**By
Naya Farisyia**

This study is to determine and evaluate the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management (Study on Market Facilities and Infrastructure owned by the Pekanbaru City Government), the assessment indicators used include Input (Input), Output (Output), Outcome (Results), Benefit (Benefit), Impact (Impact). This type of research uses quantitative descriptive, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool and the data collected with this questionnaire is then used as raw material for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence of the research location, regardless of the population and sample of this study totaling 53 people, types and techniques. The data collection used consisted of primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation. While the data analysis technique used is by using a sampling technique. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that this researcher from the side of the official apparatus that the Evaluation of the Implementation of the Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management (Study on Market Facilities and Infrastructure Owned by the Pekanbaru City Government) is "Sufficiently Implemented". This is because from an internal point of view, namely the official apparatus, the Pekanbaru City Trade and Industry Office in the field of waste management in providing facilities and infrastructure in the market belonging to the Pekanbaru city government has been carried out properly and seen from the point of view of traders and cleaning workers as parties. Externally that, to realize waste management at the Pekanbaru City Trade and Industry Office, it is very important to carry out socialization to traders and cleaning workers, this is also in order to help traders and cleaning workers become more aware that the Pekanbaru City Trade and Industry Office has provided facilities and infrastructure in waste management. However, waste management activities regarding facilities and infrastructure have not run optimally.

Keywords: Evaluation, Implementation, Waste Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan kota dinegara-negara berkembang khususnya diindonesia menimbulkan tidak sedikit permasalahan pembangunan. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculkan masalah dan kerusakan lingkungan. Sampah yang meningkat akan menjadi bahaya dan bisa dalam bentuk bahan terkontaminasi dengan dioksin dan logam berat seperti merkurin, cadmium, timah, atau limbah organic dari kegiatan industri, Sampah menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Ini masyarakat membuang begitu saja sampah ke tempat-tempat sampah dan membebankan urusan selanjutnya kepada petugas kebersihan dan urusan selesai, tetapi sebenarnya permasalahan tidak selesai sampai disitu.

Bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan yang telah memberikan dampak negative antara lain terjadinya kenaikan timbunan sampah yang jauh melebihi sarana prasarana pengelolaan dan kapasitas pelayanan, sehingga membuat penampungan sampah yang ada akhirnya sampah menjadi masalah yang serius yang mengupayakan penindakan secara cepat, tepat dan professional. Fakta yang mendasarkan dari permasalahan sampah perkotaan ini adalah hal yang semakin kompleks dan dinamis, kompleks karena melibatkan banyak pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, masyarakat, inustri pedagang dan LSM, Dinamis karena produksi sampah akan beralih seiring dengan perubahan waktu.

Tumpukan sampah yang terus melonjak seiring dalam meningkatnya jumlah penduduk, tidak hanya dari segi kuantitas saja, namun kualitas atau komposisi sampah juga semakin kompleks, akibat dari adanya transformasi pola hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu lingkungan menjadi kotor dan menjadikan pandangan sungai yang mengakibatkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat. Keberadaan pemerintah tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat tidak hanya melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta membangun kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat meluaskan kemampuan dan kreatifitasnya, karena itu birokrasi public atau aparat pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang sebaik-baiknya.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam melakukan fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat dari berbagai kegiatan dan untuk itulah maka pemerintah membangun suatu system administrasi yang lebih rendah, agar dapat membagikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal, untuk membentuk pelayanan maka diperlukan suatu bentuk pembinaan terhadap aparatur agar dalam melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya yang di embankan kepadanya.

Setiap organisasi memiliki tujuan utama dalam kegiatannya agar terlaksanakan lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang-bidang yang ada dalam organisasi

untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, proses dalam pencapaian tujuan organisasi dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada secara bersama-sama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. di dalam peraturan tersebut pasal 40 menyatakan pengelolaan sampah secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000,00.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun beberapa Bidang pengelolaan sampah dipimpin oleh seorang bidang dan mempunyai rincian tugas pokok :

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
3. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.

4. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaanpetugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
5. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lainsehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkunganpasar.
6. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
7. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan dilingkungan pasar.
8. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksanakebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahanmasalah.
10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
12. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
13. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilanpembinaan pedagang.
14. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikanretribusi.
15. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima kearah yangdapat memantapkan seluruh kegiatan.

16. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang dimaksud dengan TPS ialah Tempat penampungan sementara yang disingkat dengan TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelohan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu, TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R
- b. Mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan atau angkutan sampah
- c. Memperhatikan setetika dan lingkungan
- d. Memperhatikan volume sampah
- e. Mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air/ drainase.
- f. Mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus, dan serangga/ hewan lainnya
- g. Mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap
- h. Tidak berada diatas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, kecuali pada jalan yang diatur oleh Peraturan Walikota dan
- i. Memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitar

Permasalahan sampah tidak hanya pada volumennya saja. Kurangnya kinerja Antar instansi-instansi terkait pengelolaan sampah ini juga masih menjadi masalah. Meskipun kinerjanya bisa dikatakan cukup baik, tetapi masih saja terjadi penumpukan sampah disuatu lingkungan rumahan dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sehingga mencemari udara dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan sebuah system yang baik agar jadwal dan rute pengangkutann sampah dari lingkungan pasar ke pembuangan sementara (TPS)

kemudian dilanjutkan ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) mengurangi resiko pencemaran lingkungan yang lebih teratur dan optimal, sehingga bisa disebabkan penumpukan sampah tersebut.

Salah satu kota besar yang dapat kita lihat kemajuan ekonomi yang pesat adalah kota pekanbaru. Kota pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami kemajuan sangat pesat dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan salah satu daerah tujuan pendidikan, perdagangan, bisnis, dan administrasi. Kemajuan ekonomi kota Pekanbaru yang berkembang yang dapat kita lihat dari pesatnya kemajuan pembangunan dan perekonomian.

Di Kota Pekanbaru kemajuan juga disebabkan oleh imigrasi yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi Kota Pekanbaru salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah..

Pasar tradisional juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang selama ini identic dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, sembraut, kotor dan merupakan sumber kemacetan laku lintas. Peran pasar tradisional yang semestinya biasa menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pasar merupakan salah satu muara pertemuan produsen, penjualan, pembeli dalam dunia perdagangan. Pasar yang dimaksud meliputi pasar modern dan pasar tradisonal masih menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan pasar modern

saat ini semakin tumbuh perkembangan di beberapa wilayah seiring dengan tuntutan kebutuhan pasar.

Walaupun lambat laun beberapa pasar tradisional berkembang ke arah pasar modern mengikuti tuntutan perkembangan zaman, pemerintah terus berupaya berbenah meningkatkan mutu dengan melakukan penataan pasar tradisional, pengawasan dan evaluasi baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kualitas mutu produk yang dijual. Tindakan partisipan yang paling mudah dan nyata dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan selalu menjaga kebersihan dipasar tradisional. Sebagai contoh tidak membuang sampah, pembungkus, puntung rokok, bungkus permen secara sembarangan di lingkungan pasar.

Salah satu sarana perdagangan yang sering dibicarakan oleh masyarakat baik yang tinggal dipedesaan maupun yang berada di perkotaan adalah pasar Rakyat. Penyebabnya adalah karena Pasar Rakyat yang dulu secara nomenklatur dikenal dengan istilah Pasar Tradisional merupakan tempat masyarakat untuk bertansaksi atau segala hasil kerja yang dilakukannya, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan dan penjualan barang-barang makanan hasil olahan sederhana yang dibuat oleh rumah tangga.

Menurut Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Pada periode 2005-2009, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah Daerah telah melakukan revitalisasi terhadap 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) pasar rakyat, baik revitalisasi maupun revitalisasi manajemen. Revitalisasi fisik dilakukan dengan pembangunan pasar baru maupun renovasi. Revitalisasi manajemen dilakukan dengan melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar dan pendampingan terhadap pengelolaan, konsumen, serta melakukan sosialisasi revitalisasi dilakukan dalam rangka mengembangkan pasar percontohan. Selain revitalisasi pasar rakyat, juga ditunjukkan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) yang didanai dari program stimulus.

Dikota Pekanbaru, sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk mengelola Pasar Rakyat, sembari menampung seluruh aspiransi dari para pedagang yang menggantungkan hidupnya di berbagai Pasar Rakyat yang tersebar di berbagai sudut Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangannya Kota Pekanbaru menuju kota metropolitan, pembangunan dan pengelolaan (penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan) Pasar Rakyat memiliki arti yang strategis dalam perencanaan pembangunan khusus disektor pasar

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pasar yang ada dikota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pasar pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh dinas pasar kota pekanbaru
 - a. Pasar Pagi Rumbai
 - b. Pasar Cikpuan
 - c. Pasar Labuh Baru
 - d. Pasar Simpang Baru

- e. Pasar Agus Salim
- f. Pasar Lima Puluh
- g. Pasar Tengku Kasim
2. Pasar pemerintah kota pekanbaru yang dikelola pihak II (investor)
 - a. Pasar Bawah
 - b. Pasar Sail
 - c. Pasar Kodim (The Center Plaza)
 - d. Pasar Sukaramai
 - e. Pasar induk
3. Pasar tradisional milik swasta
 - a. Pasar Dupa Kencana
 - b. Pasar Maronan Jaya
 - c. Pasar Takuana
 - d. Pasar tangor
 - e. Pasar sago
 - f. Pasar Arengka
 - g. Pasar Induk Sementara
 - h. Pasar Uka

Berdasarkan daftar pasar diatas peneliti hanya focus pada Pasar Milik

Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Pasar Cikpuan
- b. Pasar Labuh Baru
- c. Pasar Simpang Baru
- d. Pasar Agus Salim
- e. Pasar Lima Puluh
- f. Pasar Rumbai
- g. Pasar Tengku Kasim

Dengan adanya banyak pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru maka perlu SDM untuk mengelola sampah yang dalah satunya tugas untuk membersihkan sampah yang ada di lingkungan pasar Sumber Daya Manusia buruh kebersihan sampah pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana memiliki Sumber daya Manusia berjumlah 92 orang yang terdiri dari 8 orang Buruh Angkut dan 86 orang Buruh Kebersihan/Penyapuan Pasar dengan status buruh harian lepas yang ada di 8 pasar pemerintah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1: Daftar Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Buruh Angkut dan Buruh Kebersihan/Penyapu Pasar Kota Pekanbaru

No	Tupokasi	Jumlah Buruh	Keterangan
1	Buruh Angkut	8	Dari 8 buruh angkut mempunyai tugas untuk mengangkut sampah di 7 pasar
2	Buruh Kebersihan/Penyapu Pasar		
	- Cik Puan	12	
	- Labuh Baru	11	
	- Lima Puluh	10	
	- Agus Salim	16	
	- Simpang Baru	18	
	- Rumbai	15	
	- Tengku Kasim	2	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah buruh angkut memiliki 8 orang yang bertugas mengangkut sampah di 7 pasar milik pemerintah kota pekanbaru dengan pembagian 1 orang di masing-masing pasar tetapi di Pasar Simpang Baru memiliki 2 buruh angkut dikarenakan pasar tersebut pedagangnya aktif dan terlalu banyak. Sedangkan buruh kebersihan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan kurangnya buruh angkut di setiap pasar milik pemerintah kota pekanbaru sehingga memperlambat waktu untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Hal ini dapat memicu untuk menimbulkan dampak untuk penumpukan sampah yang ada di TPS di lingkungan pasar yang tidak relevan dengan kegiatan dalam pengelolaan sampah yang dimana dapat menyebabkan keterlambatan dan keteteran dalam proses pengangkutan sampah.

Gambar I.1: Standar Operasional Prosedur Penyapuan Pasar.

No	AKTIVITAS	Petugas THL Penyapuan Pasar	Kasi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Kepala Bidang Pasar
1	1. Absensi dan Apel Pagi. 2. Pesiapan Alat Kerja.	Mulai		
2	Tanda Tangan/Paraf.			
3	Melaksanakan Penyapuan Lingkungan Pasar dan Sekitarnya.			
4	Sampah di Kumpulkan dan di Angkat Menggunakan Gerobak.			
5	Sampah Sudah Terkumpul dan di Angkut Oleh Mobil.			
6	Laporan Diserahkan ke Kasi.			
7	Laporan Diproses.			
8	Hasil Laporan.		Selesai	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Bidang Pasar, 2020

Dari gambar diatas membuktikan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam suatu program sangatlah penting salah satunya Bidang Pasar, karena SOP itu sendiri sebagai acuan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian

kinerja instansi pemerintah, apakah suatu program yang dilaksanakan sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan walikota nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pada bab IV Prasarana dan Sarana terdiri dari :

- a. Tempat sampah / wadah sampah
- b. TPS/TPST
- c. TPS 3R
- d. TPA
- e. Gerobak sampah
- f. Kendaraan pengangkutan sampah

Tempat sampah / wadah sampah yang ada di lingkungan pasar milik pemerintah disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dimana diberi oleh dari pemerintah kota pekanbaru, tempat sampah/ wadah sampah paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat, mudah dikosongkan, dan mudah dibersihkan

Tempat sampah / wadah sampah ditempatkan dilokasi yang mempermudah proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA, sampah organik wajib dimasukkan kedalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ketempat sampah/ wadah sampah.

Tempat sampah / wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutupan untuk mencegah masuknya air hujan. Ukuran wadah sampah harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan. Adapun data jumlah tempat sampah di pasar milik pemerintah kota pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2: Jumlah Tempat Sampah di Pasar Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru	Kecamatan	Jumlah Tempat Sampah
1	Pasar Cikpuan	Sukajadi	12 Buah
2	Pasar Labuh Baru	Payung Sekaki	10 buah
3	Pasar Simpang Baru	Binawidya	14 buah
4	Pasar Agus Salim	Sukaramai	10 buah
5	Pasar Lima Puluh	Lima Puluh	12 buah
6	Pasar Rumbai	Rumbai	12 buah
7	Pasar Tengku Kasim	Rumbai Pesisir	2 buah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Berdasarkan table 1.2 Ada 7 pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti pasar Cikpuan, Labuh Baru, Simpang Baru, Agus Salim, Lima Puluh, Rumbai, dan Tengku Kasim. Setiap pasar memiliki tempat sampah yang berbeda dikarenakan ada beberapa pasar yang belum terlalu aktif maka dari itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota pekanbaru menyediakan tempat sampah yang berbeda beda di setiap pasarnya. Tetapi masih adanya kurang kesadaran pedagang pasar meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka bisa dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 : Penampakan Masih adanya Kurang Kesadaran Pedagang Meletakkan Tempat Sampah di Depan Kios



Dapat di lihat dari gambar diatas masih adanya kurang kesadaran pedagang di pasar Cikpuan dan Rumbai untuk meletakkan tempat sampah di depan kios-kios merekayang dimana mereka belum mematuhi peraturan untuk meletakkan tempat sampah di depan kio-kios mereka sehingga membuat pembeli merasa tidak nyaman.

Pertumbuhan pusat perbelanjaan modern yang pesat juga mengalami di Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dengan bertambah banyak supermarket, dan mall yang menawarkan kenyamanan bagi pengunjungnya. Bertambahnya pusat perbelanjaan modern di Kota Pekanbaru tersebut dapat mengancam akan keberlangsungan pasar-pasar tradisional di Kota Pekanbaru.

Setiap pengembang yang membangun diatas lahan 5 ha (lima hectare) atau dengan jumlah paling kurang 500 (lima ratus) unit rumah wajib disediakan lahan untuk TPS. Pemerintah Daerah wajib menerbitkan bangunan TPS permanen yang berada diruangan milik jalan dan ruang manfaat jalan.

TPS (Tempat Pembuangan Sementara) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ukang, pengelohan, dan tempat pengelohan terpadu Setiap Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru Memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

Gambar 1.2 : Tempat Pembuangan Sementara di Pasar



Dapat dilihat dari gambar di atas masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menjaga dan melestarikan kebersihan yang ada di lingkungan pasar sehingga tidak membuat nyaman bagi masyarakat yang melewati pasar tersebut. Salah satu contoh TPS yang ada di Pasar Simpang Baru Panam terletak di jalan Panam.

Tetapi masih ada pasar yang belum memiliki TPS permanen salah satunya di pasar Agus Salim, Cik Puan dan Labuh Baru yang tidak memiliki TPS yang permanen yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pedagang dan masyarakat pasar dalam melakukan kegiatan di lingkungan pasar.

Pengurangan, Penggunaan ulang dan daur ulang (TPS 3R) untuk wilayah permukiman disediakan oleh Pemerintah Kota masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan pemukiman, industri, khusus dan fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya. TPS harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar
2. Memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar
3. Memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan
4. Memperhatikan ketersediaan pembiayaan
5. Dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan
6. Dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah

Focus penelitian ini hanya pada pasar milik pemerintah kota Pekanbaru, sedangkan TPS 3R dilakukan pada kawasan pasar wisata, pasar wisata yang ada di Pekanbaru hanya pasar bawah di kecamatan Senapelan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pemerintah Daerah wajib memenuhi kelengkapan dan pengoperasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Pemerintah Daerah menetapkan tempat pemrosesan akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung serta pemenuhan standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah menetapkan tata ruang di TPA dan sekitar TPA yang melindungi keselamatan umum. Pemerintah Daerah menetapkan tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan sebagian dari rencana ruang wilayah kota pekanbaru.

Pengoperasian TPA dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek :

1. Geologi : tidak berlokasi di zona Holocene fault dan tidak boleh di zona bahaya geologi
2. Hidrogeologi : tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter, tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det, jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran dan dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus di akan masukan teknologi
3. Kemiringan zona : harus kurang dari 20%
4. Jarak dari lapangan terbang : jarak dari terbang harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain
5. Jarak dari permukiman
6. Tidak berada dikawasan lindung/ cagar alam
7. Bukan merupakan daerah banjir

Gambar 1.3 : TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kota Pekanbaru



Dapat dilihat dari gambar di atas adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang ada di Kota Pekanbaru di jalan muara fajar kecamatan Rumbai pesisir, yang dimana seluruh sampah yang ada di Kota Pekanbaru di buang di TPA.

Lokasi TPA (tempat pembuangan akhir) yang disediakan oleh kota pekanbaru berada di Muara Fajar di kecamatan Rumbai Pesisir yang berjarak lebih kurang dari 18,5 Km dari pusat Kota Pekanbaru, Lokasi ini memiliki luas tanah 8,6 Ha sebagian besar telah dijadikan tempat pembuangan sampah. TPA Muara Fajar mempunyai 1(satu) unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar.

TPS/TPST pengangkutan sampah dilakukan oleh truk ke muara fajar untuk pengangkutannya tergantung pasarnya karna kapasitasnya tidak terlalu banyak, pasar milik pemerintah yang banyak sampahnya adalah pasar agus Salim, pasar lima puluh, pasar labuh baru, pasar cikpuan, pasar simpang baru, pasar rumbai, selain itu pasar yang kapasitas sampahnya sedikit ialah sampah tengku kasim dikarenakan pasar Tengku kasim masih belum terlalu aktif kali.

Gerobak sampah yang baik dipasar harus mempertimbangkan medan yang dilalui petugas kebersihan untuk pengelolah sampah pasar. Medan yang menanjak dan menurun perlu diperhatikan dalam merancang gerobak sampah yang

digunakan dalam system pemindahan sampah oleh pengelolaan sampah. Hal ini agar petugas kebersihan sampah tidak terbebani dalam pekerjaan, sehingga dapat melaksanakan system pemindahan sampah yang baik.

Kegunaan gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari yang dihasilkan dari setiap kegiatan pasar dilokasi kios-kios pasar dan los-los pasar dibersihkan juga dikumpulkan dalam sebuah gerobak sampah, guna selanjutnya petugas kebersihan membuang sampah tersebut TPS (tempat pembuangan sementara). Gerobak sampah pada masing masing pasar milik kota pekanbaru menyediakan 13 gerobak sampah dan setiap pasar pun memiliki jumlah gerobak sampah yang berbeda dikarenakan ada beberapa pasar belum aktif.

Kendaraan pengangkutan sampah paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.

Kendaraan pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota pekanbaru memiliki 2 Truk untuk mengangkut sampah pasar milik pemerintah di Kota Pekanbaru.

Dikota Pekanbaru, sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk mengelola Pasar Rakyat, sembari menampung seluruh aspiransi dari para

pedagang yang menggantungkan hidupnya di berbagai Pasar Rakyat yang tersebar di berbagai sudut Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangannya Kota Pekanbaru menuju kota metropolitan, pembangunan dan pengelolaan (penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan) Pasar Rakyat memiliki arti yang strategis dalam perencanaan pembangunan khusus disektor pasar.

Adapun ditemukan beberapa fenomena dan informasi yang penulis temui dilapangan yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini, bahwa terdapat:

1. Berdasarkan survey penulis, masih kurangnya kesadaran pedagang meletakkan tempat sampah di depan kiosnya seperti pasar Cikpuan dan Rumbai dan di mana pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru belum memiliki TPS yang permanen yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
2. Masih kurangnya kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penyediaan sumber daya manusia yang belum khususnya pada bagian angkutan sampah, yang mana buruh pengangkut sampah hanya berjumlah 8 orang untuk mengangkut sampah yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga dapat memperlambat buruh angkut untuk menjalankan tugas yang dimana akan menimbulkan lambatnya mengangkut sampah sehingga terjadinya penumpukan.

Berdasarkan Fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul '**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru**

Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di pasar milik pemerintah kota pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis dan peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru).?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di pasar milik pemerintah kota pekanbaru.?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu ini diharapkan memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi khususnya dibidang Administrasi Negara (Publik).
- b. Kegunaan Praktis, yaitu menambah wawasan penulis dan pembaca tentang judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru).
- c. Kegunaan Akademik, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Secara etimologi atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari bahasa belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti luas.

Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pengerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis atau mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work* (Silalahi, 2013 : 5).

Secara terimologi, sebagai mana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011 : 19) apa yang disebut: “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurus yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Menurut (Silalahi, 2010 : 8) Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama,yaitu: Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerja sama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur, dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama.

Administrasi dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) macam kategori definisi administrasi (Hardiyansyah, 2017 : 10) sebagai berikut:

- a. administrasi sebagai proses atau kegiatan. Menurut Soetarto dan Soewarno, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusi untuk mencapai tujuan.
- b. administrasi sebagai tata usaha. Harris Muda Nasution mengatakan bahwa administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan mencatat (membukukan) setiap perubahan atau kejadian yang terjadi dalam oganisasi itu.
- c. administrasi dalam arti pemerintah/negara/publik. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa kerjasama sekelompok pemerintahan bukan hanya pihak eksekutif saja. Tetapi meliputi legislatif , eksekutif, dan hubungan diatara mereka mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain (Silalahi, 2011 : 5).

Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama anatar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas roalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Pasolong : 2014).

Syafri (2012 : 3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemeberian nomer atau kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau insitusi. Menurut Ali (2011 : 19) Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi awalan pe dan akhirnya an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan, dan apalagi pengaturan.

Administrasi menurut Sondang (2014 : 4) Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari pendapatan para pakar administrasi diatas, dapat kita simpulkan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang pemahaman, yaitu dari proses, fungsi, dan kepranataan (institusi)

a. Dari Aspek Proses

Istilah proses, secara umum diartikan sebagai sebuah urutan pelaksanaan atau peristiwa yang terjadi secara alami atau di desain(rekayasa). Dalam proses kemungkinan menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lain yang nantinya dapat menghasilkan suatu tertentu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa suatu proses mungkin dapat dikenali oleh perubahan yang dibuat pada sifat-sifat dari satu atau lebih objek dibawah pengaruh proses itu sendiri. Setiap proses yang telah berjalan selalu menghasilkan sesuatu, hasil yang diciptakan tersebut dapat berupa hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.

b. Dari Aspek Fungsi

Istilah fungsi, secara umum adalah kerjanya suatu tugas. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah fungsi diumpamakan dengan faal (kerja suatu bagian tubuh). Misalnya, bekerjanya fungsi jantung dalam tubuh manusia, yang membagi tugas utamanya adalah memompa dan mengalirkan darah keseluruh tubuh. Kalau sehat berarti berfungsi. Sebaliknya, kalau tidak sehat kemungkinan jantung akan mengalami difungsi(tidak berfungsi).

Jadi, pengertian fungsi administrasi adalah keseluruhan kegiatan (aktivitas) yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok dan mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok yang berada di dalam organisasi.

c. Dari Aspek Pranata (Lembaga)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pranata(lembaga) adalah system tingkat laku social yang bersifat resmi serta adat-adat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, serta seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat, institusi.

Dari pemahaman tersebut, administrasi dilihat dari aspek kepranataan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan secara resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusi yang berkelompok dalam suatu kelompok dan dinamakan pranata atau lembaga.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah meupakan sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam uapaya mencapai sasran-sasaran atau tujuantujuan organisasi yang bersangkutan (Winardi, 2011 : 15).

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang berkumpul bersama disekitar suatu teknologi yang digunakan untuk mengubah *input-input* menjadi barang dan jasa yang dapat dipasarkan (Sunyanto, 2013 : 37).

Organisasi menurut Stephen Robbins (dalam Sopiah, 2008 : 2) adalah satuan soaial yang berkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atas serangkaian tujuan bersama.

Organisasi menurut Griffin (dalam Sule dan Saefullah, 2010 : 4) adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendri Andry, 2015: 14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serata formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zulkifli, 2014).

Menurut (Zulkifli, 2014) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak bisa menghindari berbagai bentuk pengaruh dari perubahan yang sudah datang ke aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Dari beberapa pengertian organisasi diatas, dapat kita temukan terdapat kata tujuan(Goals), kerja sama, stuktur, teknik, dan psikologi.

- a) Tujuan organisasi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan tujuan. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi.

- b) Kerja sama organisasi dapat diartikan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling bantu-membantu dengan sesama anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Struktur adalah susunan komponen-komponen dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut dikordinasikan.
- d) Teknik diartikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif maka orang-orang yang bekerja sama tersebut perlu dibekali pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- e) Pysikososial atau jiwa social organisasi juga mempunyai system psikososial yang terdiri orang-orang dan kelompok yang berinteraksi serta saling dipengaruhi oleh perasaan, nilai-nilai, sikap, harapan, dan aspiransi dari orang-orang dalam organisasi itu.

3. Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2010 : 1), “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok atau orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasioanal atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaanya disebut *manager* atau pengelola.”

Menurut Winardi (2010 : 76) mengemukakan manajemen sebagai berikut: “Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk menderterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Syafri (2012 : 2) hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain: “manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.”

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2013 : 2).

Menurut Suswanto dan Doni (2014 : 16) manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (2014 : 1) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar-dasar manajemen yaitu:

1. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
2. Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
3. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan

Menurut Stoner, et. al. (Zulkifli, 2014 : 17) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, pengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaannya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan dapat di definisikan sebagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu factor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni :

1. Kebijakan merupakan praktika social, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok yang membuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu system, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu yang ditentukan sebagai suatu solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;

2. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
3. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
4. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik

tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.

Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah.

2. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak diharapkan (spillover negative effect).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
2. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.

3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (stakeholders). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007)

5. Konsep Evaluasi

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, dibutuhkan suatu penilaian untuk melihat dan mengukur sejauh mana keberhasilan yang dilakukan organisasi tersebut. Proses tersebut dinamakan evaluasi. Teori Dunn (2003;608), evaluasi adalah hubungan masing-masing yang menunjukkan pada aplikasi skala ini terdapat hasil kebijakan dan program. Secara spesifik

evaluasi berkenaan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan

Winarno, (2007;226) mengemukakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan adalah kegiatan menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implemementasi dan dampak.

Menurut Zulkifli (2009;137), evaluasi (penilaian) adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan tugas baik yang sudah selesai maupun yang sedang dikerjakan dengan standar atau target (rencana) yang telah ditetapkan. Orientasi pelaksanaan aktifitas fungsi ini adalah untuk mengetahui koordinasi yang sesungguhnya dari seluruh sumber daya beserta aspek organisasi pada kurun waktu tertentu.

Menurut Akdon (dalam Badrudin, 2015;260) penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian output dan outcomes organisasi mencapai tujuan dan sasaran adalah focus dari kegiatan pengukuran kinerja. Adapun Akdon (2011) mengemukakan indikator yang umumnya digunakan yaitu indikator input, output, outcome, benefit, dan impact.

1. Input (masukan), adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi dan kebijakan
2. Output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik
3. Outcome (hasil), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)
4. Benefit (manfaat), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari semua.

Sedangkan menurut pendapat Islamy, Rossi dalam Widodo (2009, h.121) mengemukakan bahwa evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan dua pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kebijakan/proyek menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan?
- b. Apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan ?

Dengan diadakannya evaluasi pada sebuah kebijakanprogram, maka dapat diungkapkan apakah dampak yang diharapkan dari program tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran serta dapat mengukur seberapa besar manfaat yang telah diperoleh.

Menurut Nurcholis (2007;277) evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada prinsip ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkap instrumen yang meliputi:

1. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Outputs (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.

4. Outcomes (dampak), yaitu apakah suatu pelaksana kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa mengevaluasi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri. Didalam proses pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu harus menentukan apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan bila tidak sesuai dengan harapan, maka melakukan tindak koreksi.

Dun (Agustino, 2012;189-190) mengemukakan tiga jenis pendekatan pada evaluasi meliputi:

1. Evaluasi semua. Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan, tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
2. Evaluasi formal Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode eskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan
3. Evaluasi keputusan teoretisdalah pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Subarnoso (2009;126) mengatakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas : Apakah hasil yang digunakan telah tercapai
2. Kecukupan :Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecah masalah
3. Pemerataan : Apakah biaya dan manfaat di distribusikan (pembagian) mereka kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas : Apakah hasil kebijakan memuat preferensi nilai kelompok dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan : Apakah hasil yang di capai bermanfaat

Menurut Sulistyani (skripsi Indra, 2012;23) ada beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan evaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap perubahan yang diamati merupakan akibat dari perubahan tersebut atau karena penyebab lain.
- e. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Agustino (2012;194-196) mengemukakan permasalahan dalam evaluasi kebijakan meliputi:

1. Ketidak pastian arah/tujuan kebijakan.

2. Hubungan sebaiaian akibat
3. Pengaruh kebijakan yang menyebar
4. Kesulitan dalam memperoleh data
5. Penolakan penjabat kantor (Official Resistance)

Dari semua pendapat ahli mengenai evaluasi penulis membuat suatu kesimpulan bahwa evaluasi adalah melihat hasil dari kebijakan yang sudah dibuat atau sudah diterapkan.

6. Konsep Sampah

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenagi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang pengelolaan sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dihendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disengangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak digunakan. Dengan demikian sampah yang mengandung prinsip berikut:

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
2. Adanya hubungan langsung/ tidak langsung dengan kekuatan manusia
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)

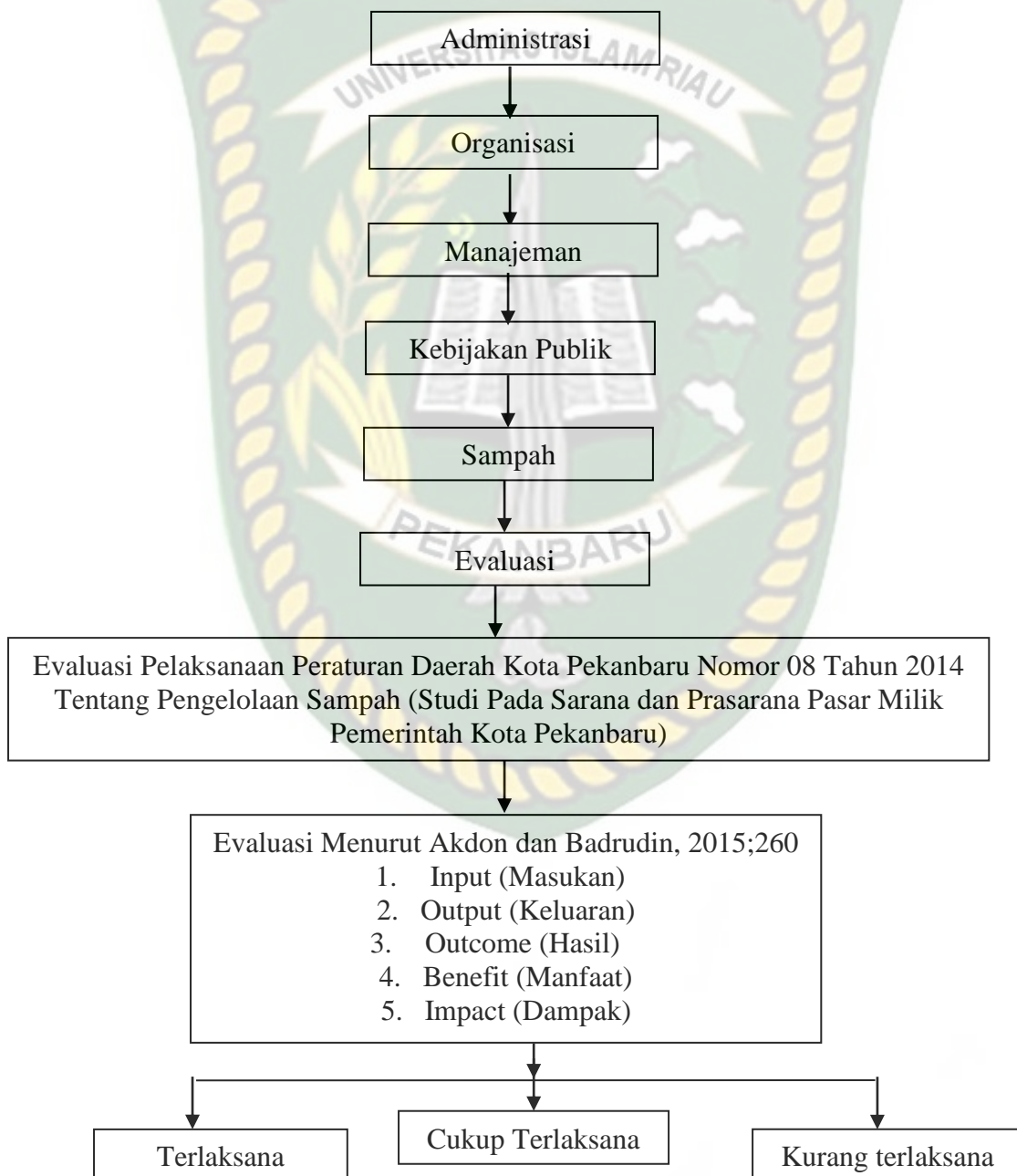
Sampah adalah suatu yang tidak dihendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU no 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah:

1. Sampah yang dapat membusuk menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak membusuk, terdiri dari sampah plastic, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpontensi irreversible atau sakit berat yang pulih
5. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1: Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait usulan penelitian ini, maka penelitian memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih dan sekelompok orang yang berkomitmen (persetujuan) untuk bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disetujui atau disepakati bersama.
2. Manajemen adalah sebuah proses dengan tujuan mengatur sesuatu atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau sekelompok orang dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dimiliki.
3. Kebijakan publik adalah kebijakan public sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.
4. Evaluasi adalah kegiatan menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak
5. Output (masukan), adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar terlaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya, dana, SDM, informasi dan kebijakan.

6. Output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik.
7. Benefit (manfaat), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
8. Impact (dampak), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
9. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau bahan yang tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai.

D. Operasional variabel

Dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, item penilaian dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan dari operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan mengelompokkan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian adalah **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH(STUDI PADA SARANA& PRASARANA PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU) ”** yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1: Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana & Prasarana pasar milik pemerintah kota pekanbaru)

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Menurut Akdon (2011) penilaian evaluasi keberhasilan pencapaian output dan outcomes organisasi dalam mencapai tujuandan sasaran adalah focus dari kegiatan pengukuran (badrudin,2015 ;260)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana& Prasarana dipasar Kota Pekanbaru)	1.Input (masukan)	a.tersedianya SDM yang memadai dalam pengelolaan sampah b.Tersedianya gerobak sampah yang layak dipakai.	Terlaksanakan Cukup Terlaksanakan Kurang Terlaksanakan
		2.Output (keluaran)	a.tersedia Tempat sampah b.tersedianya TPS sampah	Terlaksanakan Cukup Terlaksanakan Kurang Terlaksanakan
		3.Outcome (hasil)	a.terawarnya dan terjaganya fasilitas pasar b.Terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan	Terlaksanakan Cukup Terlaksanakan Kurang Terlaksanakan
		4.Benefit (Manfaat)	a.terciptanya keamanan dan kenyamanan pasar b.terciptanya kinerja dalam pengelolaan sampah	Terlaksanakan Cukup Terlaksanakan Kurang Terlaksanakan
		5.Impact (Dampak)	a.Terjuwudnya kebersihan lingkungan pasar b.Terwujudnya peningkatan sarana& Prasarana	Terlaksanakan Cukup Terlaksanakan Kurang Terlaksanakan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

E. Teknik Pengukuran

Teknik mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi para Sarana&Prasarana pasar milik pemerintah kota pekanbaru), maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas dapat dinilai melalui indicator sebagai berikut :

- Terlaksanakan: Apabila semua indicator pada kategori Terlaksana berada 67%- 100%
- Kurang Terlaksanakan: Apabila semua indicator cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%
- Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana beradapada rentang skor 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut:

1. Input

- Terlaksanakan : Apabila semua indicator pada kategori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%.
- Kurang Terlaksanakan : Apabila semua indicator cukup terlaksana berada pada rentang34%-66%.
- Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana beradapada rentang skor 0%-33%.

2. Output(Keluaran)

- Terlaksanakan : Apa bila semua indicator pada kategori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%.
- Kurang Terlaksanakan: Apa bila semua indicator cukup terlaksana berada Pada rentang34%-66%.

Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana berada pada rentang skor 0%-33%.

3. Outcome (Hasil)

Terlaksanakan : Apa bila semua indicator pada kategori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%.

Kurang Terlaksanakan: Apa bila semua indicator cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana berada pada rentang skor 0%-33%.

4. Benefit (Manfaat)

Terlaksanakan: Apabila semua indicator pada kategori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%.

Kurang Terlaksanakan: Apa bila semua indicator cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana berada pada rentang skor 0%-33%.

5. Impact(Dampak)

Terlaksanakan : Apa bila semua indicator pada kategori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%.

Kurang Terlaksanakan: Apa bila semua indicator cukup terlaksana berada pada rentang 34%-66%.

Tidak Terlaksanakan: Apa bila semua indicator kurang terlaksana berada pada rentang skor 0%-3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Tipe penelitian survey deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggunakan sejumlah sampel (responden) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul lebih akurat dan nyata.

Metode penelitian kuantitatif jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan dengan cara perhitungan dan interpretasi yang disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian aktual.

Oleh karena itu, penulis memilih tipe penelitian survey deskriptif dengan analisa kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah(studi pada Sarana & Prasarana pasar milik pemerintah Kota Pekanbaru).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru karena penulis menemukan adanya masalah pada Pengelolaan Sampah mengenai sarana dan prasarana di pasar yang mana ialah belum berjalan dengan baiknya Sarana dan Prasarana yang ada dipasar

milikpemerintah Kota Pekanbaru, Yaitu : Pasar Cikpuan, Pasar Labuh Baru, Pasar Lima Puluh, Pasar Agus Salim, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Tengku Kasim.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang menjadi objek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bidang Pasar, Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL, Buruh Kebersihan, dan Pedagang.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel.

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bidang Pasar	1	1	100%
2	Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan	2	2	100%
3	Buruh Kebersihan	87	7	8%
4	Pedagang	1697	50	2,94%
Jumlah		1787	60	3,35%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Teknik penarikan sampel sampling jenuh, dalam hal ini teknik sampel sampling jenuh dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil dan dapat dijangkau. Penarikan sampel sampling jenuh ini dilakukan pada pegawai kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, Penentuan teknik penarikan sampel purposive sampling ini digunakan untuk buruh kebersihan dan pedagang karena jumlah pedagang dan buruh kebersihan yang terlalu banyak, sehingga hanya diambil dalam jumlah sedikit saja.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber yang asli dengan melakukan observasi, wawancara, dan memberikan angket kepada responden atau objek penelitian yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana & Prasarana dipasar).

2. Data sekunder

Sumber data penelitian yang didapatkan melalui media perantara. Data yang diperoleh antara lain, standar operasi anl prosedur, dan data pendukung lainnya yang diperoleh langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket atau Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang dijawab langsung oleh Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban, Buruh Kebersihan dan Pedagang. teknik ini ditujukan kepada Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban dan pedagang.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung atau bertatap muka, teknik ini ditujukan kepada Bidang Pasar, Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban, Buruh Kebersihan dan Pedagang.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melihat kondisi dilapangan tempat penelitian.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan media perantara bertujuan untuk mengabadikan secara momen baik dalam bentuk foto, video, rekaman maupun bentuk dokumen, teknik ini tunjukan kepada Bidang Pasar, Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban Pasar Kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisis Data

Data yang berasal dari jawaban kuesioer dan jawaban wawancara responden di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan diolah

untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu analisa yang memberikan gambaran berdasarkan kenyataan atau fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah (studi pada Sarana& Pra sarana dipasar) adalah sebagai berikut :

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 (Studi Pada Sarna Dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke 2021																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■																		
3	Revisi UP							■	■																
4	Revisi Kuesioner									■	■	■	■												
5	Rekomendasi Survey											■	■												
6	Survey Lapangan												■	■	■	■	■								
7	Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																			■	■	■	■	■	■
10	Ujian Konferehensif Skripsi																							■	■
11	Revisi Skripsi																								■
12	Penggandaan Skripsi																								■

Sumber: Olahan Penulis, 2021

I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematik penulisan usulan penelitian ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematik penulisan skripsi.

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah ringkas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi,

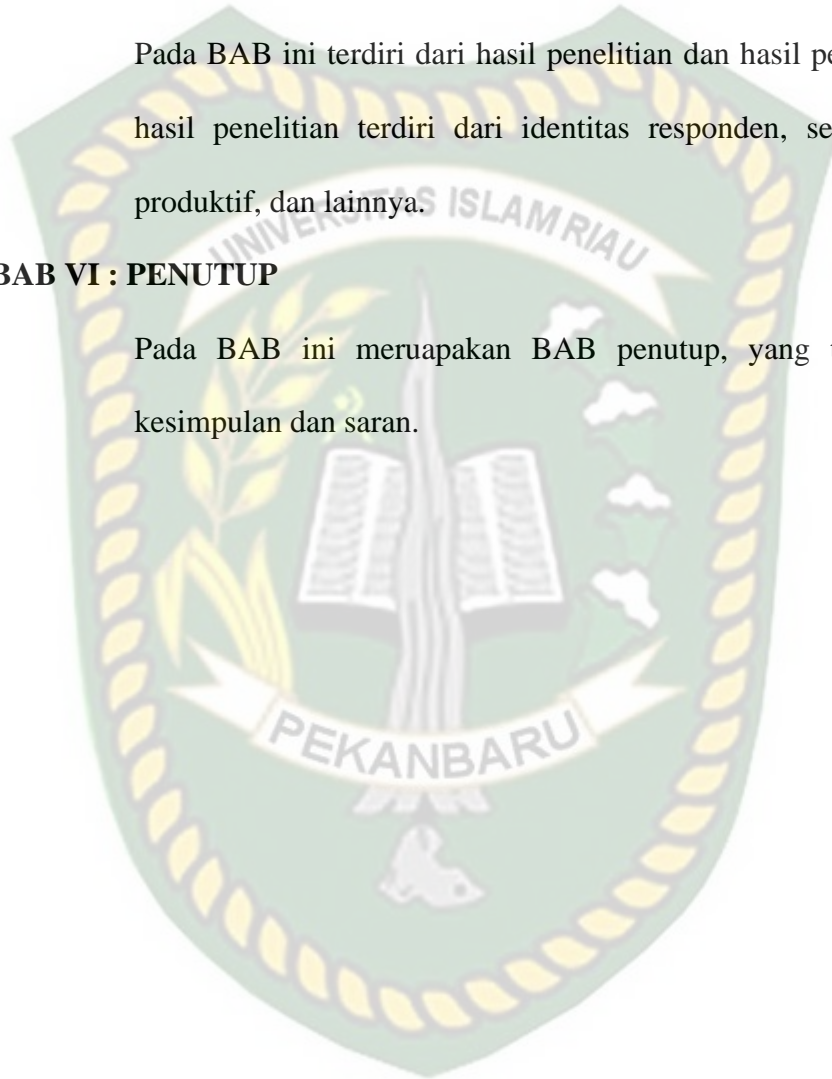
sumber daya organisasi, dan informasi lain yang relevan dengan judul penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, hasil penelitian terdiri dari identitas responden, seperti umur produktif, dan lainnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan BAB penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Sampai saat ini, dalam masyarakat pada umumnya masih sulit untuk membedakan antara Perindustrian dan Perdagangan yang sepintas hampir sama artinya, namun sebenarnya cukup jauh bedanya artinya. Sebelum diundang-undangkan Ordinasinya tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat maupun gas mereka menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo, kali, depa, cupak, hasta dan lain sebagainya dalam dunia Perdagangan.

Atas kejelian pemerintah waktu itu yang masig dalam situasi penjajahan Belanda, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan pemerintah waktu itu tepat tanggal 24 Februari 1923 dengan Staatblad No.57 yang berisikan pokok-pokok peraturan yang antara lain:

System matrik mulai diperkenalkan dan wajib untuk dipakai dalam dunia Perindustrian dan Perdagangan. Diwajibkan kepada masyarakat Tera dan Tera Ulang. Dibentuk jabatan khusus pelaksanaan Ordonasi 1923 (Dienset Van Het Ijkwejen) yang merupakan cikal bakal dari direktorat Metrologi.

Secara kronologis dapat diuraikan perkembangan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta instusi yang pelaksanaanya sebagai berikut :

- 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinasinya Tera 1923 (Staatblad No.157)

- 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinas Tera 1923 (Staatblad No. 225)
 - 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum
 - 01 Juli 1949 Lahir Ordonasi Tera 1949 (Staatblad No.157)
 - 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi
- Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota pekanbary merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996: Bergabunglah Departemen Perindustrian dengan Departemen
Perdagangan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru pada tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok Dinas tersebut.

Lalu pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkan Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yaitu

bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menjadi Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini ditentukan berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustria.

B. Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terwujudnya Pusat Perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menjunjukkan ekonomi kerakyatan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru :

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industri dan perdagangan
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerja sama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen

C. Tugas, Fungsi dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam Lingkup tugasnya
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- i. Pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretarian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas dalam Melaksanakan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan peraturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris terdiri dari :

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- c.1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggarakan penyusunan pedoman dan tujuan teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolagian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
- c.2. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
- c.3. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
- c.4. Melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrology legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
- c.5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian terdiri dari :

- Seksi Pengawasan Metrologi
- Seksi Pengawaasan Perdagangan
- Seksi Pengawasan Perindustrian

Setiap seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian.

d. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan. Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- d.1. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
- d.2. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin usaha perdagangan dan surat keterangan asal barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang didalam dan luar negeri
- d.4. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen
- d.5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu
- d.6. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha
- d.7. Pengkoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- d.8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
- Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan;
- Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.

- Setiap Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

e. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
2. perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada
4. pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
5. pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
6. pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar;
7. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja;

8. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
9. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
10. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
11. pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
12. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
13. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha;
14. pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pasar terdiri dari :

- Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan;
- Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL;
- Seksi Retribusi.

- Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.

f. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri;
2. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan;
3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong;
4. Promosi produk industri;
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri;
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi;
7. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri;
8. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan;
9. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama;
10. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri kreatif;
11. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri;
12. Pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industri;
13. Penyusunan tata ruang industri;
14. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
15. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri;

16. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri;
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- Seksi Sarana dan Usaha Industri;
- Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

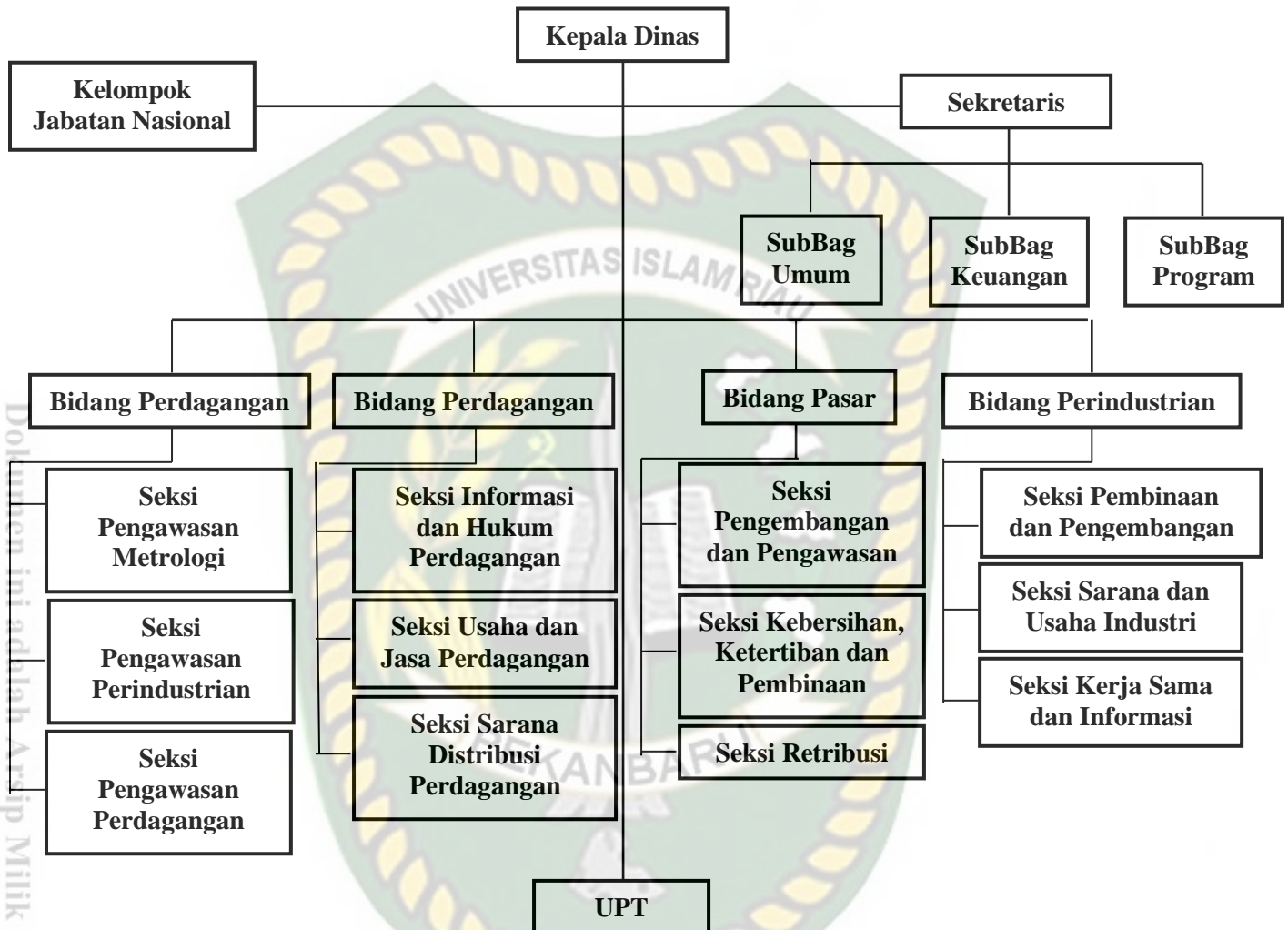
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

D. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota pekanbaru

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 tahun 2016 tanggal 30 september 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat di bawah ini :

Gambar IV. 2 : Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang paling berperang penting adalah responden, karena responden itu sendiri merupakan sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Dipasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru), penulis mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisis hasil data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini.

Sehubungan dengan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Dipasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru diperlukan data atau identitas responden agar penulis bisa membagikan perkelompoknya, adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan sebagai berikut :

1. Tingkat usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam melakukan yindakan yang berfikir dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan. Biasanya yang lebih tua cenderung lebih jearah bekrja dan berfikir lebih matang, karena telah memiliki kestabilitas dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam kegiatan yang dilakukan sekaligus dalam

pekerjaanya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Aparatur Dinas terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Dipasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru) Berdasarkan tingkat usia.

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20-30	2	33,3%
2	31-40	1	33,3%
3	41-50	0	0%
4	50>	0	0%
	Jumlah	3	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi tingkat kerja atau produktivitas kerja. Aparatur Dinas yang produktif dalam bekerja adalah usia 20-30 Tahun dan 31 - 40 Tahun dibandingkan dengan usia 41-50 tahun. Menurut Tanto (2012) dan Mahendra dan Woyanti (2014) dalam kutipan Selvia Apriyanti (2017 : 69) salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas karyawan adalah faktor usia. Usia yang masih dibawah produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang memiliki menjadi lebih lemah dan terbatas.

Tabel V.2: Identitas Responden Buruh Kebersihan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Sarana dan Prasarana Dipasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru) Berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20-30	4	57%
2	31-40	3	43%
3	41-50	0	0%
4	50>	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Buruh Kebersihan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada Usia 20-30 berjumlah 4 orang. Hal ini dikarenakan usia 20-30 lebih produktif dalam menjalankan aktifitas, sehingga lebih banyaknya usia 20-30 yang mengetahui tentang perkembangan pengelolaan sampah tentang Sarana dan Prasarana di Pasar

Tabel V.3: Identitas Responden Pedagang Terhadap Evaluasi Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan(Studi Pada Sarana dan Prasarana Dipasar Milik Pemerintah KotaPekanbaru) Berdasarkan tingkat usia.

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20-30	35	70%
2	31-40	10	20%
3	41-50	5	10%
4	50>	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa responden pedagang terhadap sarana dan prasarana yang berada pada Usia 20-30 berjumlah 35 orang. Hal ini dikarenakan usia 20-30 lebih produktif dalam menjalankan aktifitas, sehingga lebih banyaknya usia 20-30 yang mengetahui tentang perkembangan pengelolaan sampah tentang Sarana dan Prasarana diPasar

2. Jenis kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagai menjadi dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin Laki – Laki dan Jenis kelamin Perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional responden yang bersangkutan didalam melakukan kegiatan sekaligus didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pedagang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.4 : Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Sarana dan Prasaranan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki-Laki	2	66,7%
2	Perempuan	1	33,3%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.4 bahwa laki-laki lebih dominan, hal ini disebabkan karena pengetahuan dan melakukan pekerjaan di bidang pengelolaan sampah lebih unggul dari pada perempuan.

Tabel V.5 : Identitas Responden Buruh Kebersihan Terhadap Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki – Laki	5	71%
2	Perempuan	2	29%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.5 diatas bahwa diketahui responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana terdiri dari 5 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 2 orang dengan jenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden terhadap Evaluasi Sarana dan Prasarana didominasi oleh jenis kelamin Laki-Laki.

Tabel V.6 : Identitas Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki – Laki	20	40%
2	Perempuan	30	60%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.6 diatas bahwa diketahui responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana terdiri dari 20 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 30 orang dengan jenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan

bahwa responden terhadap Evaluasi Sarana dan Prasarana didominasi oleh jenis kelamin Perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Identitas Responden Aparatur Dinas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	0	0%
2	Diploma	0	0%
3	Sarjana (S1/S2)	3	100%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.7 bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana dan cara kerja aparatur dinas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai dinas maka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pedagang, akan tetapi tingkat pendidikannya semakin rendah maka kemampuan memberikan pelayanan kepada pedagang juga semakin terbatas.

Tabel V.8 : Identitas Responden Buruh Kebersihan terhadap Sarana dan Prasarana Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	3	43%
2	SLTA	4	57%
3	Diploma	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi sikap dan pola prilakunya. Dalam tabel diatas

responden buruh kebersihan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana lebih dominan tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 4 Orang, Oleh karena itu minimnya pengetahuan Buruh Kebersihan pasar mengenai pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sarana dan prasarana dipasar

Tabel V.9: Identitas Responden Pedagang terhadap Sarana dan Prasarana Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	15	30%
2	SLTA	35	70%
3	Diploma	0	0%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi sikap dan pola prilakunya. Dalam tabel diatas responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana lebih dominan tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 35 Orang, Oleh karena itu minimnya pengetahuan pedagang pasar mengenai pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sarana dan prasarana dipasar

B. Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak) yang bertujuan mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08

Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)

1) **Input (Masukan)**

Input (Masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana , SDM, informasi dan kebijakan

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pedagang dan buruh kebersihan tentang Sarana dan Prasarana berjumlah 57 orang terhadap indikator Input (Masukan) yang terdiri dari dua item penilaian yaitu tersedianya SDM, adanya gerobak sampah yang layak dipakai untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Tentang Sarana dan Prasarana mengenai indikator Input (Masukan) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersediannya SDM	1 (33,3%)	2 (66,7%)	0 (0%)	3
2	Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai	1 (33,3%)	2 (66,7%)	0 (0%)	3
	Jumlah	2	4	0	6
	Rata –rata	1	2	0	3
	Persentasi	33,3%	66,7%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 bahwa tanggapan responden aparatur dinas mengenai indikator Input (Masukan) pada kategori “Cukup Terlaksana ”

Tersedianya SDM . Dari jawaban responden aparatur dinas yang menjawab Cukup Terlaksana, dikarena aparatur dinas sudah cukup lengkap untuk menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) di pasar seperti buruh angkut untuk mengangkut sampah.

Adanya Gerobak sampah yang layak dipakai . Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Cukup Terlaksana, dikarenakan fasilitas gerobak sampah yang disediakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di pasar kota pekanbaru sudah cukup untuk menyediakan gerobak sampah di setiap pasarnya sesuai dengan peraturan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Bapak Saptir, S.Sos mengenai Indikator Input (Masukan) dengan pertanyaan Apakah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyediakan dana cukup dana untuk penyediaan Sarana dan Prasarana di setiap Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru?

Beliau Menjawab :

“ kurang cukup memadai, karna penyediaan dana yang diberikan oleh pemerintah kota pekanbaru tidak sesuai dengan anggaran penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang diajukan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga hal ini berdampak pada kurangnya dana dalam pengelolaan sampah untuk membeli Sarana dan Prasarna untuk dipasar.”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10.35 WIB).

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Input merupakan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah kota pekanbaru harus sama dengan anggaran dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga Sarana dan Prasarana dalam pemenuhan serta SDM teralisasi

Kemudian berdasarkan hasil observasi penelitian mengenai indikator Input, berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan peneliti melihat masih belum cukup optimalnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Bidang Pengelolaan sampah di pasar seperti menyediakan gerobak sampah di pasar dan masing belum cukup optimalnya dalam mengatasi (SDM) seperti buruh angkut.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi diatas bahwa untuk indikator Input pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan aparatur dinas masih belum memadai sehingga belum begitu memadai dalam menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) di pasar seperti buruh angkut untuk mengangkut sampah, dan fasilitas gerobak sampah untuk pengangkutan sampah di pasar yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kota pekanbaru untuk Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru sudah banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi. Terlebih anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kota pekanbaru untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru anggaran Pengelolaan Sampah masih belum cukup dengan apa yang di anggarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tabel V. 11 : Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Input (masukan) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersediannya SDM	2 (28,5%)	1 (14,3%)	4 (57,2%)	7
2	Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai	2 (28,5%)	1 (14,3%)	4 (57,2%)	7
	Jumlah	4	2	8	14
	Rata-Rata	2	1	4	7
	Persentase	28,6%	14,3%	57,1%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden Buruh Kebersihan berada pada kategori “Kurang Terlaksana”

Tersediannya SDM (Sumber Daya Manusia). Dilihat dari jawaban responden Buruh Kebersihan mereka menjawab Kurang Terlaksana, Dikarenakan untuk Sumber Daya Manusia mengenai buruh angkut sampah belum terlaksana dengan optimal sehingga memperlambat untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai. Dilihat dari jawaban responden buruh kebersihan mereka menjawab Kurang Terlaksana, Dikarenakan masih ada beberapa buruh kebersihan masih belum puas dengan kinerja aparaturnya mengenai masih kurang adanya gerobak sampah yang tidak layak dipakai lagi

sehingga memperlambat kerja buruh kebersihan untuk mengangkut sampah di depan kios-kios pedagang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Buruh Kebersihan di pasar Bapak Marjo. Mengenai indikator Input (Masukan) dengan pertanyaan. Apakah menurut bapak Sudah cukup adanya gerobak sampah yang layak dipakai yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

“belum cukup layak, karena kami buruh kebersihan memerlukan gerobak yang layak kami gunakan tetapi masih banyak kendala kami untuk mengangkut sampah dari kios ke TPS seperti ban gerobak tiba-tiba bocor, kurangnya gerobak di pasar sehingga kadang menjadi kendala kami untuk bekerja, kami juga sudah melakukan pengaduan kepada petugas kordinasi tetapi lambat untuk di respon sehingga memperlambat kami untuk mengangkut sampah “

(Wawancara : 10 Agustus 2021, 10:35 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Input (Masukan) banyak buruh kebersihan yang belum cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai pengelolaan sampah seperti gerobak sampah yang belum cukup layak di pakai.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Input (Masukan) pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan buruh kebersihan belum merasa terbantu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Pengelolaan Sampah seperti fasilitas gerobak sampah yang masih tidak layak dipakai lagi tetapi buruh kebersihan sudah melakukan

pengaduaan kepada kodinator kebersihan tetapi lambat untuk di respon, dan untuk SDM seperti buruh angkut untuk mengangkut TPS di setiap pasar milik pemerintah Kota Pekanbaru menjadi lambat dikarenakan kurangnya buruh angkut.

Dengan demikian diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Input (Masukan) berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan untuk Sumber Daya Manusia mengenai buruh angkut sampah belum terlaksana dengan optimal sehingga memperlambat untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan untuk Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai masih ada beberapa buruh kebersihan masih belum puas dengan kinerja aparatur mengenai masih kurang adanya gerobak sampah yang tidak layak dipakai lagi sehingga memperlambat kerja buruh kebersihan untuk mengangkut sampah di depan kios-kios pedagang. dikarenakan buruh kebersihan belum merasa terbantu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Pengelolaan Sampah seperti fasilitas gerobak sampah yang masih tidak layak dipakai lagi tetapi buruh kebersihan sudah melakukan pengaduaan kepada kodinator kebersihan tetapi lambat untuk di respon, dan untuk SDM seperti buruh angkut untuk mengangkut TPS di setiap pasar milik pemerintah Kota Pekanbaru menjadi lambat dikarenakan kurangnya buruh angkut.

Tabel V. 12 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Input (masukan) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersediannya SDM	16 (32%)	21 (42%)	13 (26%)	50
2	Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai	19 (38%)	16 (32%)	15 (30%)	50
	Jumlah	35	37	28	100
	Rata-Rata	17,5	18,5	14	50
	Persentase	35%	37%	28%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

\ Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Tersediannya SDM (Sumber Daya Manusia). Dilihat dari jawaban responden pedagang mereka menjawab Cukup Terlaksana, Dikarenakan sudah cukup terbantu mengenai buruh kebersihan untuk membersihkan sampah yang ada di pasar. Tetapi masih belum lambatnya buruh angkut sampah untuk mengangkut sampah di TPS sehingga dapat membuat lingkungan pasar tidak enak di pandang karna banyakya sampah yang menumpuk.

Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai. Dilihat dari jawaban responden pedagang mereka menjawab Cukup Terlaksana, Dikarenakan ada beberapa pasar yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih adanya Gerobak Sampah yang tidak layak di pakai sehingga memperlambat buruh kebersihan yang ada di pasar mengambil sampah di setiap depan kios-kios kami.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar Bapak Roby Ikan. Mengenai indikator Input (Masukan) dengan pertanyaan. Apakah menurut bapak Sudah cukup adanya gerobak sampah yang layak dipakai yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

“belum terlalu cukup layak, karena penyediaan gerobak sampah yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih kurang, dan masih ada beberapa gerobak yang tidak layak dipakai sehingga buruh kebersihan yang ada di pasar lambat untuk melakukan pengangkutan smapah di kios-kios kami”

(Wawancara : 10 Agustus 2021, 10:35 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Input (Masukan) banyak pedagang yang belum cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti gerobak sampah yang belum cukup layak di pakai sehingga memperlambat buruh kebersihan untuk membersihkan smapah di depan kios-kios kami.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Input (Masukan) pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pedagang belum merasa tertolong dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai fasilitas Pengelolaan Sampah seperti gerobak sampah yang masih tidak layak dipakai dan memperlambat pekerjaan buruh kebersihan yang ada di pasar untuk mengangkut sampah di depan kios-kios, dan masih

kurangnya SDM seperti buruh angkut untuk mengangkut sampah TPS di setiap pasar kota pekanbaru.

Dengan demikian diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Input (Masukan) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Tersediannya SDM (Sumber Daya Manusia) sudah cukup terbantu mengenai buruh kebersihan untuk membersihkan sampah yang ada di pasar. Tetapi masih belum lambatnya buruh angkut sampah untuk mengangkut sampah di TPS sehingga dapat membuat lingkungan pasar tidak enak di pandang karna banyakya sampah yang menumpuk. Adanya Gerobak Sampah yang layak dipakai ada beberapa pasar yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih adanya Gerobak Sampah yang tidak layak di pakai sehingga memperlambat buruh kebersihan yang ada di pasar mengambil sampah di setiap depan kios-kios kami oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti gerobak sampah yang belum cukup layak di pakai sehingga memperlambat buruh kebersihan untuk membersihkan sampah di depan kios-kios kami.

2) Output (Keluaran)

Output (keluaran) pernyataan hasil pada tingkat pencapaian jangka pendek, langsung dapat diperoleh hasil dari kegiatan yang dilakukan dan seluruhnya dalam kendali manajemen organisasi, dalam hal ini adalah Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi pada sarana dan prasarana)

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pedagang dan buruh kebersihan terhadap sarana dan prasarana yang berjumlah 57 responden terhadap indikator Output yang dari dua item penilaian yaitu tersedianya tempat sampah, tersedianya TPS sampah yang memadai. Sebagai berikut :

Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Output(Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersedianya Tempat Sampah	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
2	Tersedianya TPS yang sesuai dengan realisasinya	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata-rata	2	1	0	3
	Persentase	66,7%	33,3%	0%	100

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.13 diatas bahwa dapat dilihat untuk tanggapan aparatur dinas untuk indikator output berada pada kategori “Terlaksana” Tersediannya Tempat Sampah. Dari jawaban responden aparatur dinas yang menjawab Terlaksana , dikarenakan aparatur dinas sudah melakukan tugas dan kewajiban dalam menyediakan tempat sampah di setiap pasar milik pemerintah kota pekanbaru sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku dan di terapkan.

Tersediannya TPS yang sesuai dengan realisasinya. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Terlaksana, hal ini dikarenakan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan suatu pembangunan

dipasar dengan menyediakan TPS di pasar untuk menampung sampah sementara di lingkungan pasar yang sesuai dengan realisasinya yang dapat meningkatkan pasar.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak Syafruddin SH Mengenai indikator Output dengan Pertanyaan Apakah Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah menyediakan Prasarana dan Sarana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ?

Beliau Menjawab :

“ sarana dan Prasarana yang telah kami sediakan di pasar milik pemerintah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru, dengan menyediakan tempat sampah di berbagai pasar serta menyediakan TPS yang sesuai ketentuan guna dapat menampung sampah agar tidak terjadinya penumpukan sampah di sekitaran pasar dan jalan, tetapi pasar yang kami kelola seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru belum kami sediakan TPS yang permanen dikarenakan pasar tersebut memiliki jumlah tanah yang kurang cukup dan pasar tersebut pun berlokasi di tepi jalan, sehingga dapat memengaruhi bagianjalan”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa segi indikator Output (Keluaran) terutama tersediannya TPS untuk menampung sampah di setiap pasar dan tempat sampah yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Pekanbaru sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi peneliti, indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan adalah aparatur dinas sudah ada bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, tetapi masih ada beberapa pasar belum ada TPS permanen seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan aparatur dinas sudah melakukan tugas dan kewajiban dalam menyediakan tempat sampah di setiap pasar milik pemerintah kota pekanbaru sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku dan di terapkan, dan mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan suatu pembangunan dipasar dengan menyediakan TPS di pasar untuk menampung sampah sementara di lingkungan pasar yang sesuai dengan realisasinya yang dapat meningkatkan pasar, tetapi ada beberapa pasar seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru belum ada TPS yang permanen yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Tabel V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Output(Keluaran) Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersedianya Tempat Sampah	2 (28,5%)	3 (42,8%)	2 (28,8%)	7
2	Tersedianya TPS yang sesuai dengan realisasinya	2 (28,5%)	3 (42,8%)	2 (28,8%)	7
	Jumlah	4	6	4	14
	Rata-rata	2	3	2	7
	Persentase	28,6%	42,8%	28,6%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.14 diatas bahwa dapat dilihat untuk tanggapan responden buruh kebersihan untuk indikator output berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Tersediannya Tempat Sampah. Dari jawaban responden buruh kebersihan yang menjawab Cukup Terlaksana , dikarenakan tempat sampah yang di berikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah cukup terlengkapi bagi pedagang sehingga buruh kebersihan yang ada di pasar mudah untuk mengangkat sampah yang berada di lingkungan pasar

Tersediannya TPS yang sesuai dengan realisasinya. Dari jawaban responden buruh kebersihan mereka menjawab Cukup Terlaksana, hal ini dimana pasar Cikpuan, Simpang Baru, Lima Puluh, Rumbai, Tengku Kasim sudah terdapat TPS yang permanen di sudut-sudut pasar dan dimana pasar Agus Salim, Cikpuan dan Pasar Lima Puluh masih belum memiliki TPS permanen yang disediakan oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikarenakan pasar tersebut memiliki lahan yang sedikit sehingga susah untuk membangun TPS yang permanen.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu buruh kebersihan bapak Sunardi Mengenai indikator Output dengan Pertanyaan Bagaimana menurut bapak apakah sudah tersediannya tempat sampah yang diinginkan ?

Beliau Menjawab :

“untuk penyediaan tempat sampah di pasar sudah cukup bagi kami para buruh kebersihan sehingga mempermudah kami untuk mengangkat sampah yang telah ada di pasar, tetapi masih kurangnya kerjasama dan kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios mereka jualan yang telah disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sehingga membuat kami sudah untuk membersihkan sampah yang ada dilingkungan pasar yang bias membuat para pembeli merasa kurang nyaman”
(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa segi indikator Output (Keluaran) sudah cukup maksimal untuk para buruh kebersihan sehingga mempermudah buruh kebersihan untuk mengangkat sampah yang ada di lingkungan pasar

Berdasarkan observasi peneliti, indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan adalah buruh kebersihan sudah cukup puas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai penyediaan fasilitas seperti sudah tersediannya tempat sampah yang di letakan di depan kios-kios para pedagang seperti pasar Labuh Baru, Simpang Baru, Agus Salim, Lima Puluh, Tengku Kasim dan tetapi masih

ada beberapa pasar seperti pasar Cikpuan dan Rumbai masih kurangnya kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka.

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Tersediannya Tempat Sampah. Dikarenakan tempat sampah yang di berikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah cukup terlengkapi bagi pedagang sehingga buruh kebersihan yang ada di pasar mudah untuk mengangkat sampah yang ada di lingkungan pasar, tetapi masih ada beberapa pasar seperti pasar Cikpuan dan Rumbai yang dimana kurangnya kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka. Tersediannya TPS yang sesuai dengan realisasinya. Hal ini dimana pasar Cikpuan, Simpang Baru, Lima Puluh, Rumbai, Tengku Kasim sudah terdapat TPS yang permanen di sudut-sudut pasar dan dimana pasar Agus Salim, Cikpuan dan Pasar Lima Puluh masih belum memiliki TPS permanen yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikarenakan pasar tersebut memiliki lahan yang sedikit sehingga susah untuk membangun TPS yang permanen.

Tabel V. 15 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Output (Keluaran) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersediannya Tempat sampah	22 (44%)	16 (32%)	12 (24%)	50
2	Tersediannya TPS yang sesuai dengan realisasinya	17 (34%)	16 (32%)	17 (36%)	50
	Jumlah	39	32	29	100
	Rata-Rata	19,5	16	14,5	50
	Persentase	39%	32%	29%	100

Sumber : Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.15 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pedagang mengenai indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Terlaksana”

Tersediannya Tempat Sampah. Dilihat dari jawaban responden pedagang pasar mereka menjawab Terlaksana, karena sudah lengkap pengelolaan sampah yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti tersediannya tempat sampah di setiap pasar untuk diletakan di depan kios-kios para pedagang.

Tersediannya TPS yang sesuai dengan realisasinya. Dilihat dari jawaban responden pedagang pasar mereka menjawab Terlaksana, dikarenakan TPS yang di bangun secara permanen yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup dengan kebutuhan para pedagang sehingga dapat untuk menampung sampah yang ada di pasar yang dikelola oleh pemerintah kota pekanbaru seperti pasar Cikpuan, Simpang Baru, Lima Puluh, Rumbai dan Tengku Kasih. Tetapi masih ada beberapa pasar yang tidak ada memiliki TPS yang permanen yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti

pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru dikarenakan pasar tersebut masih memiliki lahan yang belum cukup.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang dipasar bapak Deni Aprianto. Mengenai indikator Output (Keluaran) dengan pertanyaan. Bagaimana menurut bapak apakah sudah tersediannya tempat sampah yang diinginkan ? Beliau Menjawab :

“Alhamdulillah sudah, dengan tersediannya tempat sampah yang disediakan kami para pedagang dapat membuang sampah pada tempatnya, hanya saja masih adanya beberapa pedagang lain masih kurangnya kesadaran untuk meletakkan tempat sampah yang telah disediakan sehingga tidak membuat nyaman buat para pedagang lainnya karna masih terdapatnya sampah yang bertebaran lingkungan pasar”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi Output (Keluaran) sudah bagus dari segi penyediaan tempat sampah yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah sepenuhnya terpenuhi di pasar milik pemerintah kota pekanbaru

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa untuk indikator Output (Keluaran) berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pedagang sudah cukup puas dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru seperti TPS yang permanen dan Tempat Sampah, tetapi masih ada beberapa pasar belum ada TPS yang permanen seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru dan masih kurangnya kesadaran pedagang meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka seperti pasar Cikpuan dan pasar rumbai.

Dengan demikian hasil penyebaran kuesioner, observasi bahwa indikator Output berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan karena sudah lengkap fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti tersediannya tempat sampah di setiap pasar puas dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru seperti TPS yang permanen dan Tempat Sampah, tetapi masih ada beberapa pasar belum ada TPS yang permanen seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru dan masih kurangnya kesadaran pedagang meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka seperti pasar Cikpuan dan pasar rumbai dan TPS yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup dengan kapasitas untuk menampung sampah sementara yang ada dilingkungan pasar tetapi ada beberapa pasar yang tidak ada TPS seperti pasar Agus Salim dan Labuh Baru.

3) Outcome (Hasil)

Outome (hasil) merupakan pernyataan hasil pada tingkat pencapaian jangka menengah, tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan sebagian kontribusi dari pihak lain.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Terhadap Sarana dan Prasarana yang berjumlah 57 orang responden terhadap indikator Outcome(hasil) yang terdiri dari dua item penilaian yaitu yang pertama terawatnya dan terpilihnya fasilitas pasar serta pelayanan pedagang dan yang kedua terpenuhi kebutuhan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.16 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Outcome (hasil) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terawatnya dan Terjaganya fasilitas pasar	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
2	Terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata- Rata	2	1	0	3
	Persentase	66,7%	33,3%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.16 jawaban responden aparatur dinas mengenai indikator Outcome (hasil) berdasarkan pada kategori “Terlaksana”

Terawatnya dan Terjaganya Fasilitas Pasar. Dilihat dari jawaban aparatur dinas Terlaksana, dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah menerapkan aturan-aturan mengenai fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SOP yang ada. Dengan merawat fasilitas pasar maka akan terjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada pasar yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Terpenuhi Kebutuhan Pedagang dan buruh kebersihan dilihat dari jawaban aparatur dinas Terlaksana, dikarenakan SOP yang berlaku dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan pasar maka kami menyeleksi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan dalam lingkungan pasar yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Pasar yang belum memiliki TPS

yang permanen dikarenakan lahan di pasar tersebut belum cukup memadai untuk membangun TPS yang permanen.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Syafrina SE selaku Seksi Kebersihan, Pembinaan dan Ketertiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai indikator Outcome (Hasil) dengan pertanyaan Bagaimana menurut ibu mengetahui kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan pasar dalam fasilitas pasar ? Beliau Menjawab :

“kami memenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan dengan menyeleksi laporan yang diberikan buruh kebersihan kepada kasi, mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang ada di pasar yang masih terawat dan terjaga. Dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di pasar untuk tetap merawat dengan baik kami memberikan tugas kepada buruh kebersihan agar tetap untuk merawat dan menjaga fasilitas pasar yang kami berikan, mengenai pasar yang belum memiliki TPS yang permanen kami sudah melakukan rapat untuk membangun TPS tetapi lahan untuk membangun TPS belum ada di pasar tersebut. ”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Outcome (Hasil) Terlaksana karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah memenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan mengenai Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori “CukupTerlaksana”. Hal ini dikarenakan dilihat dari

pemerintah kota pekanbaru memberi anggaran mengenai fasilitas sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan yang ada di pasar.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah menerapkan aturan-aturan mengenai fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SOP yang ada. Dengan merawat fasilitas pasar maka akan terjaganya fasilitas pasar yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan SOP yang diterapkan dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan di pasar maka kami menyeleksi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan dalam lingkungan pasar yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka.

Tabel V.17 : Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Outcome (hasil) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terawatnya dan Terjaganya fasilitas pasar	2 (28,5%)	4 (57,2%)	1 (14,3%)	7
2	Terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan	2 (28,5%)	3 (42,8%)	2 (28,5%)	7
	Jumlah	4	7	3	14
	Rata- Rata	2	3,5	1,5	7
	Persentase	28,6%	50%	21,4%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.17 jawaban responden buruh kebersihan mengenai indikator Outcome (hasil) berdasarkan pada kategori “Cukup Terlaksana”

Terawatnya dan Terjaganya Fasilitas Pasar. Dilihat dari jawaban buruh kebersihan Cukup Terlaksana, dikarenakan tugas yang diberikan kepada buruh kebersihan belum cukup maksimal untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada dipasar melakukan tugas yang di berikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada buruh kebersihan untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada di pasar tetapi blum terlalu maksimal dikarenakan masih ada beberapa buruh kebersihan terledor atau belum tegas dalam menjaga dan untuk merawat fasilitas yang di berikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada kami.

Terpenuhi Kebutuhan Pedagang dan buruh kebersihan dilihat dari jawaban buruh kebersihan Cukup Terlaksana, dikarenakan buruh kebersihan masih melihat masih ada belum cukup terlalu terpenuhi kebutuhan buruh kebersihan yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai fasilitas pasar dan masih ada beberapa pasar yang belum terlalu cukup fasilitas yang lengkap seperti belum ada TPS permanen di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru, gerobak sampah tidak layak di pakai sehingga memperlambat buruh kebersihan untuk bekerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu buruh kebersihan ibuk wati mengenai indikator Outcome (Hasil) dengan pertanyaan Apakah sudah terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan mengenai sarana dan prasaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ? Beliau Menjawab :

“belum terlalu kami para buruh kebersihan masih kekurangan dengan fasilitas sarana dan prasarana mengenai gerobak sampah yang tidak layak di pakai lagi, masih ada TPS yang belum di bangun secara permanen sehingga kami para buruh kebersihan membuang sampah di tepi lingkungan pasar.

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Outcome (Hasil) cukup terlaksana karena masih belum cukup terpenuhi kebutuhan buruh kebersihan mengenai fasilitas sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan bahwa masih ada terdapat beberapa fasilitas pasar yang belum cukup terawat dan terjaga fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada buruh kebersihan sehingga tidak dapat untuk kebutuhan yang panjang dan masih belum cukup terpenuhi kebutuhan untuk para buruh kebersihan mengenai sarana dan prasarana di pasar seperti masih belum ada TPS yang permanen di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru dan masih ada gerobak yang tidak mesti layak dipakai lagi sehingga memperlambat buruh kebersihan untuk melakukan tugasnya.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Terawatnya dan Terjaganya Fasilitas Pasar Dikarenaka tugas yang diberikan kepada buruh kebersihan belum cukup maksimal untuk merawat dan menjaga fasilitas yang ada dipasar dan belum

Terpenuhi Kebutuhan Pedagang buruh kebersihan masih melihat masih ada belum cukup terlalu terpenuhi kebutuhan buruh kebersihan yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai fasilitas pasar dan masih ada beberapa pasar yang belum terlalu cukup fasilitas yang lengkap seperti belum ada TPS permanen di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru.

Tabel V.18 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana mengenai indikator Outcome (hasil) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terawatnya dan terjaganya fasilitas pasar	22 (44%)	16 (32%)	12 (24%)	50
2	Terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan	23 (46%)	13 (26%)	14 (28%)	50
	Jumlah	45	29	26	100
	Rata- Rata	22,5	14,5	13	50
	Persentase	45%	29%	26%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel V.18 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden pedagang mengenai indikator Outcome (Hasil) beradapa dapa kategori “Terlaksana”

Terawatnya dan jaganya fasilitas pasar dilihat dari jawaban responden pedagang pasar mereka menjawab Terlaksana, dikarenakan pedagang pasar menilai bahwa dengan ikut serta dalam merawat dan menjaga fasilitas yang diberikanoleh Dinas Perdagangan dan Perindustian Kota Pekanbaru bisa membuat fasilitas sarana dan prasarana bisa aman dan dapat di pakai dalam jangka waktu yang panjang.

Terpenuhi Kebutuhan Pedagang dan buruh kebersihan dilihat dari jawaban responden pedagang pasar mereka menjawab Terlaksana, dikarenakan sudah sepenuhnya tercukupi fasilitas pengelolaan sampah mengenai sarana dan prasarana yang telah di sediakan untuk para pedagang tetapi masih adanya kurang yaitu masih adanya gerobak sampah yang masih belum layak dipakai untuk para buruh kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di lingkungan pasar, masih belum ada TPS yang permanen di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Lima Puluh

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar Bapak Diki. Mengenai indikator Outcome (Hasil) dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak apakah sudah terpenuhinya kebutuhan mengenai sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? Beliau Menjawab :

“kalo terpenuhi dari keseluruhan belum, dikarenakan masih terdapat fasilitas pasar yang kurang memenuhi dalam pengelolaan sampah seperti masih adanya gerobak yang tidak layak di pakai lagi, mudah rusak dan hilang dan kadang keterlambatan buruh kebersihan untuk pengangkutan sampah di pasar membuat kami merasa resah dengan sampah yang merusak lingkungan di pasar kadang sampai kejalan .”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Outcome (Keluaran) belum cukup terlaksana masih ada beberapa fasilitas pengelolaan sampah yang kurang atau belum sepenuhnya terpenuhi untuk pengelolaan sampah di pasar.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa mengenai indikator Outcome berada pada Kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan ada beberapa pasar milik pemerintah kota pekanbaru masih belum terawat dan terjagannya fasilitas pasar, seperti pasar Agus Salim, Cikpuan dan labuh baru yang belum tersediannya TPS yang permanen dikarenakan di pasar agus salim, Cikpuan dan labuh baru terletak di kawasan tepi jalan (area kota) sehingga dalam pembuangan sampah di tumpuk tepi jalan hal ini dapat mengganggu kegiatan di lingkungan pasar. Terawatnya dan terjagannya fasilitas pasar bahwa dengan ikut serta dalam merawat dan menjaga fasilitas yang disediakan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan pedagang dalam hal kebersihan lingkungan pasar. Terpenuhi Kebutuhan Pedagang masih belum sepenuhnya tercukupi fasilitas pengelolaan sampa.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Terawatnya dan jaganya fasilitas pedagang pasar menilai bahwa dengan ikut serta dalam merawat dan menjaga fasilitas yang disediakan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan pedagang dalam hal kebersihan lingkungan pasar. Terpenuhi Kebutuhan Pedagang sudah sepenuhnya tercukupi fasilitas pengelolaan sampah mengenai sarana dan prasarana yang telah di sediakan untuk para pedagang tetapi masih adanya kurang yaitu masih adanya gerobak sampah yang masih belum layak dipakai untuk para buruh kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di lingkungan pasar, masih belum ada TPS yang permanen di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Lima Puluh.

4) Benefit (Manfaat)

Benefit (Manfaat) nilai tambah dari suatu hasil yang dimanfaatkan akan nampak setelah beberapa waktu kemudian indikator manfaat menunjukan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 57 orang responden terhadap indikator Benefit (Manfaat) yang terdiri dari Terciptanya keamanan dan kenyamanan pasar, Terciptanya pelayanan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V. 19 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Benefit (Manfaat) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terciptanya keamanan dan kenyamanan pasar	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
2	Terciptanya kinerja dalam pengelolaan sampah	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata- Rata	2	1	0	3
	Persentase	66,7%	33,3%	%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.19 diatas jawban responden aparatur dinas mengenai indikator benefit (manfaat) berada pada kategori “Terlaksana”

Terciptanya kenyamanan dan keamanan pasar. Dilihat dari jawaban responden dinas menjawab Terlaksana, dikarenakan aparatur dinas sudah sepenuhnya memberikan dan menciptakan kenyamanan dan keamanan pasar milik pemerintah

kota pekanbaru. Dalam hal memberikan sarana dan prasarana kepada pedagang dan buruh kebersihan pasar dan beberapa pasar sudah menerapkan kenyamanan di lingkungan pasar.

Terciptanya Kinerja dalam Pengelolaan Sampah. Dilihat dari jawaban responden dinas menjawab Terlaksana, dikarenakan aparatur dinas bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan serta mengelolaa sarana dan prasarana berjalan dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saptir S,Sos selaku kepala Bidang Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai indikator Benefit (Manfaat) dengan pertanyaan Bagaimana Kinerja Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ? Beliau Menjawab :

“kami bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dengan memberikan tugas kepada buruh kebersihan dengan menerapkan hal-hal mengenai absensi, melaksanakan penyapuan lingkungan pasar dan sekitarnya, sampah dikumpulkan dan diangkat menggunakan gerobak, sampah sudah terkumpul dan diangkut oleh mobil, laporan diserahkan ke kasi, laporan proses hingga mendapatkan hasil laporan. Dimana hasil laporan dapat menunjang kinerja dari dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di pasar”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas Benefit (Manfaat) bahwa aparatur dinas sudah bekerja sesuai dengan SOP dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “ Terlaksana”. Hal ini dikarenakan aparaturnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pedagang dan buruh kebersihan dengan menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan aparaturnya sudah sepenuhnya memberikan dan menciptakan kenyamanan dan keamanan pasar milik pemerintah kota Pekanbaru. Dalam hal memberikan sarana dan prasarana kepada pedagang dan buruh kebersihan pasar dan beberapa pasar sudah menerapkan kenyamanan di lingkungan pasar dan aparaturnya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan serta mengelola sarana dan prasarana berjalan dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

Tabel V. 20 : Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Benefit (Manfaat) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terciptanya keamanan dan kenyamanan pasar	2 (28,5%)	3 (42,8%)	2 (28,5%)	7
2	Terciptanya kinerja dalam pengelolaan sampah	2 (28,5%)	4 (57,2%)	1 (14,3%)	7
	Jumlah	4	7	3	14
	Rata- Rata	2	3,5	1,5	7
	Persentase	28,6%	50%	21,4%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.20 diatas jawaban responden buruh kebersihan mengenai indikator benefit (manfaat) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Terciptanya kenyamanan dan keamanan pasar. Dilihat dari jawaban responden buruh kebersihan menjawab Cukup Terlaksana, dikarenakan buruh kebersihan sudah melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan untuk membersihkan lingkungan pasar sehingga dapat terciptanya kenyamanan dan keamanan untuk para pedagang dan masyarakat

Terciptanya Kinerja dalam Pengelolaan Sampah. Dilihat dari jawaban responden buruh kebersihan menjawab Cukup terlaksana, dikarenakan buruh kebersihan belum cukup terlalu maksimal melakukan tugas untuk membersihkan lingkungan pasar dan menjaga fasilitas yang ada di pasar sehingga belum terlalu bisa untuk menciptakan kinerja pengelolaan sampah dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu buruh kebersihan bapak Paryono mengenai indikator Benefit (Manfaat) dengan pertanyaan Bagaimana manfaat yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terhadap fasilitas mengenai sarana dan prasarana ? Beliau Menjawab :

“manfaat yang kami dapatkan dari fasilitas yang diberikan dinas perdagangan dan perindustrian kepada buruh kebersihan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan yang ada dipasar belum cukup sepenuhnya untuk terciptanya kinerja dalam pengelolaan sampah yang ada dipasar masih belum terlalu lengkap mengenai sarana dan prasarana yang ada di pasar terutama masih ada beberapagerobak sampah yang tidak layak di pakai dan masih ada TPS yang belum dibangun secara permanen kami dapatkan ”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas Benefit (Manfaat) bahwa buruh kebersihan belum terlalu cukup mendapatkan manfaat dari fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan peneliti melihat dilapangan buruh kebersihan belum mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan oleh dinas perdagangan dan perindustrian terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang ada di beberapa pasar.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan terciptanya kenyamanan dan keamanan pasar buruh kebersihan sudah melalukan semaksimal mungkun untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberihan untuk membersihkan lingkungan pasar sehingga dapat terciptanya kenyamanan dan keamanan untuk para pedagang dan masyarakat dan belum cukup terciptanya Kinerja dalam Pengelolaan Sampah buruh kebersihan belum cukup terlalu maksimal melakukan tugas untuk membersihkan lingkungan pasar dan menjaga fasilitas yang ada di pasar sehingga belum terlalu bisa untuk menciptakan kinerja pengelolaan sampah dengan baik.

Tabel V. 21 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Benefit (Manfaat) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terciptanya keamanan dan kenyamanan pasar	23 (46%)	10 (2%)	17 (34%)	50
2	Terciptanya Kinerja dalam pengelolaan sampah	26 (52%)	11 (22%)	13 (26%)	50
	Jumlah	49	21	30	100
	Rata- Rata	24,5	10,5	15	50
	Persentase	49%	21%	15%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.21 diatas jawaban responden pedagang pasar mengenai indikator benefit (manfaat) berada pada kategori “Terlaksana”

Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Pasar. Dilihat dari jawaban responden pedagang pasar menjawab Terlaksana, dikarenakan pedagang pasar dengan adanya berupa sarana dan prasarana yang diberikan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan pasar.

Terciptanya Kinerja dalam Pengelolaan Sampah. Dilihat dari jawabab responden pedagang pasar menjawab Terlaksana, dikarenakan pedagang pasar merasa terbantu dengan kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar Bapak Suwarno. Mengenai indikator Benefit (Manfaat) dengan pertanyaan.

Bagaimana manfaat yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap fasilitas sarana dan prasarana ? Beliau Menjawab :

“saya rasa manfaat yang kami dapatkan sebagai pedagang pasar sudah cukup baik, dengan di berikannya fasilitas kami pedagang dan pembeli merasa nyaman dan aman ketika fasilitas tersebut terpenuhi dengan begitu kinerja dari dinas dalam pengelolaan sampah sangat membantu kami”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui hasil wawancara bahwa Benefit (Manfaat) dari kinerja dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tanggung jawab maka pedagang pasar akan merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada dilingkungan pasar

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Dikarenakan beberapa fasilitas seperti Gerobak Sampah, TPS, Tempat Sampah, Angkutan Sampah dimasing-masing pasar masih ada beberapa belum tercukupi, hal ini dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pasar dalam kegiatan jual-beli.

Dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pedagang pasar dengan adanya berupa sarana dan prasarana yang diberikan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan pasar. Terciptanya Kinerja dalam Pengelolaan Sampah pedagang pasar merasa terbantu dengan kinerja dinas dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, dan masih ada beberapa fasilitas dalam pengelolaan sampah seperti Gerobak Sampah, TPS, Tempat Sampah, Angkutan Sampah dimasing-masing pasar masih ada

beberapa belum tercukupi, hal ini dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pasar dalam kegiatan jual-beli.

5) Impact (Dampak)

Impact (Dampak) adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden atau tanggapan dari responden yang berjumlah 57 orang terhadap indikator Impact (Dampak) yang terdiri dari dua item penilaian yaitu Terwujudnya Kebersihan dan Lingkungan Pasar, Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V. 22 : Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Impact (Dampak) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terwujudnya kebersihan di lingkungan pasar	1 (33,3%)	2 (66,7%)	0 (0%)	3
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan Prasarana	1 (33,3%)	2 (66,7%)	0 (0%)	3
	Jumlah	2	4	0	6
	Rata- Rata	1	2	0	3
	Persentase	33,3%	66,7%	0%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.22 diatas jawban responden aparatur dinas mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar. Dilihat dari jawaban responden dinas menjawab Cukup Terlaksana, dikarenakan aparaturnya sudah cukup untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk pedagang dan buruh kebersihan sehingga bisa untuk mewujudkan kebersihan yang ada di sekitaran lingkungan pasar.

partisipasi ke pedagang dan buruh kebersihan dalam menjaga kebersihan yang ada di sekitaran lingkungan pasar sehingga sulit untuk mewujudkan

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana. Dilihat dari jawaban responden dinas menjawab Cukup terlaksana, dikarenakan aparaturnya merasa bahwa ada beberapa pasar yang masih belum cukup untuk terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana dikarenakan ada beberapa pasar kurang aktif kegiatan jual beli.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saptir S,Sos selaku kepala Bidang Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai indikator Impact (Dampak) dengan pertanyaan Bagaimana Dampak dari pengelolaan sampah oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ? Beliau Menjawab :

“Dampak dalam pengelolaan sampah kami berharap sarana dan prasarana yang kami berikan kepada pedagang dan buruh kebersihan dapat terwujudnya kebersihan di lingkungan pasar dan yang dimana hal ini akan mendukung peningkatan pengelolaan sampah dalam fasilitas sarana dan prasarana yang kami kelola”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas Impact (Dampak) dinas berharap pedagang dan buruh kebersihan dapat membantu mewujudkan kebersihan dilingkungan pasar untuk meningkatkan sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan adanya tugas yang diberikan belum berjalan maka hal ini menyebabkan kurang optimalnya dalam mewujudkan kebersihan di lingkungan pasar serta dalam meningkatkan sarana dan prasarana belum dapat tercukupi.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar aparaturnya sudah cukup untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk pedagang dan buruh kebersihan sehingga bisa untuk mewujudkan kebersihan yang ada di sekitaran lingkungan pasar. Dalam Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturnya merasa bahwa ada beberapa pasar belum terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana dikarenakan ada beberapa pasar kurang aktif kegiatan jual beli dan adanya tugas yang diberikan belum berjalan maka hal ini menyebabkan kurang optimalnya dalam mewujudkan kebersihan di lingkungan pasar serta dalam meningkatkan sarana dan prasarana belum dapat tercukupi.

Tabel V. 23 : Distribusi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Impact (Dampak) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terwujudnya kebersihan di lingkungan pasar	1 (14,3%)	3 (42,8%)	3 (42,8%)	7
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan Prasarana	1 (14,3%)	2 (28,6%)	4 (57,2%)	7
	Jumlah	2	5	7	14
	Rata- Rata	1	2,5	3,5	7
	Persentase	14,3%	35,7%	50%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.23 diatas jawaban responden buruh kebersihan mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Kurang Terlaksana”

Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar. Dilihat dari jawaban responden buruh kebersihan menjawab Kurang Terlaksana, dikarenakan dipasar cikpuan dan rumbai masih terdapat kurang kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka sehingga kurang untuk meningkatkan terwujudnya kebersihan yang ada dipasar

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana. Dilihat dari jawaban responden buruh kebersihan menjawab Kurang Terlaksana, dikarenakan buruh kebersihan masih kurang dengan sarana dan prasarana yang ada di pasar dan masih belum ada peningkatan yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai fasilitas sarana dan prasarana seperti masih ada gerobak

sampah yang tidak layak di pakai lagi, TPS di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru belum ada TPS yang permanen

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu buruh kebersihan bapak Yusuf. Mengenai indikator Impact (Dampak) dengan pertanyaan apakah sudah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ? Beliau Menjawab :

“saya belum merasakan peningkatan sarana dan prasarana tentang pengelolaan sampah, dampak yang kami dapatkan dari belum ada peningkatan mengenai sarana dan prasarana ini dapat menyebabkan buruh kebersihan yang ada di pasar mendapatkan halangan dalam pekerjaannya seperti masih adanya gerobak sampah yang tidak layak di pakai lagi dan masih ada beberapa pasar yang belum ada TPS yang permanen”

(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas Impact (Dampak) buruh kebersihan belum merasakan dampak dari peningkatan sarana dan prasana mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “ Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan peneliti melihat di lapangan masih ada beberapa gerobak sampah yang tidak layak dipakai petugas kebersihan sudah melakukan pengaduan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tapi mereka lambat untuk merespon pengaduan tersebut, dan masih ada terdapat beberapa pasar masih belum ada TPS yang permanen.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar. Dipasar cikpuan dan rumbai masih terdapat kurang kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios-kios mereka sehingga kuruang untuk meningkatkan terwujudnya kebersihan yang ada dipasar dan Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang ada di pasar dan masih belum ada peningkatan yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai fasilitas sarana dan prasarana seperti masih ada gerobak sampah yang tidak layak di pakai lagi, TPS di pasar Agus Salim, Cikpuan dan Labuh Baru belum ada TPS yang permanen, peningkatan sarana dan prasarana tentang pengelolaan sampah, dampak yang kami dapatkan dari belum ada peningkatan mengenai sarana dan prasarana ini dapat menyebabkan buruh kebersihan yang ada di pasar mendapatkan halangan dalam pekerjaannya seperti masih adanya gerobak sampah yang tidak layak di pakai lagi dan masih ada beberapa pasar yang belum ada TPS yang pemanen, dan gerobak sampah yang tidak layak dipakai petugas kebersihan sudah melakukan pengaduan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tapi mereka lambat untuk merespon pengaduan tersebut.

Tabel V. 24 : Distribusi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Indikator Impact (Dampak) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terwujudnya kebersihan di lingkungan pasar	14 (28%)	12 (24%)	24 (48%)	50
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan Prasarana	13 (26%)	13 (26%)	24 (48%)	50
	Jumlah	27	25	48	100
	Rata- Rata	13,5	12,5	24	50
	Persentase	27%	25%	24%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.24 diatas jawaban responden Pedagang Pasar berada pada kategori “Kurang Terlaksana”

Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar. Dilihat dari jawaban responden pedagang pasar menjawab Kurang Terlaksana, dikarenakan pedagang pasar masih merasa kebersihan yang ada di lingkungan pasar belum memuaskan masih terdapat penumpukan sampah di depan-depan kios dan di TPS.

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana. Dilihat dari jawaban responden pedagang pasar menjawab Kurang terlaksana, dikarenakan pedagang belum merasakan perubahan dan peningkatan dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru seperti masih ada gerobak yang tidak layak di pakai lagi, TPS yang belum di buat secara permanen

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad mengenai indikator Impact (Dampak) dengan pertanyaan Bagaimana terwujudnya peningkatan sarana

dan parasana oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ? Beliau Menjawab :

“saya belum merasakan dampak dari peningkatan sarana dan prasarana yang di sediakan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih terdapat masalah-masalah pengelolaan sampah yang belum ada perkembangan”
(Wawancara : Rabu 10 Agustus 2021, 10:35)

Diketahui dari hasil wawancara Impact (Dampak) pedagang belum merasa puas dengan kinerja dinas dalam meningkatkan sarana dan prasarana karna belum ada perkembangan dalam pengelolaan sampah.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Kurang Terlaksana” dikarenakan pedagang belum merasakan dampak dengan terwujudnya kebersihan yang ada di lingkungan pasar sehingga masih terbantu dengan fasilitas pengelolaan sampah yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Impact (Dampak) berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pedagang belum merasa ada dampak Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Pasar pedagang pasar masih merasa kebersihan yang ada dilingkungan pasar belum memuaskan masih terdapat penumpukan sampah di depan-depan kios. Dan masih belum Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana mereka belum merasakan perubahan dan peningkatan dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada sarana dan prasarana pasar milik pemerintah kota pekabaru)

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui seluruh tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi pada sarana dan prasarana pasar milik pemerintah kota pekabaru)

Rekapitulasi ini membantu peneliti dalam menilai keseluruhan indikator yaitu : Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak). Apakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi pada sarana dan prasarana pasar milik pemerintah kota pekabaru) sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasana Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat dilihat dari table rekapitulasi berikut :

Tabel V.25 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi padasarana dan prasarana pasar milik pemerintah kota pekabaru)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Input (Masukan)	1 (33,3%)	2 (66,7%)	0 (0%)	3
2	Output (Keluaran)	2 (66,7%)	1 (33,6%)	0 (0%)	3
3	Outcome(Hasil)	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
4	Benefit (Manfaat)	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)	3
5	Impact (Dampak)	0 (0%)	1 (33%)	2 (67%)	3
	Jumlah	7	6	2	15
	Rata-rata	1,4	1,2	0,4	3
	Persentase	46,7%	40%	13,3%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2021

Dari tabel V.25 diatas rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada aparatur dinas, mereka menjawab rata-rata berada pada kategori “Terlaksana”

Indikator Input (Masukan), mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai masih belum cukup melaksanakan pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) di pasar seperti buruh angkut untuk mengangkut sampah belum terlalu optimal sehingga masih banyaknya keterlambatan untuk mengangkut sampah di pasar dari TPS ke TPA

Indikator Output (keluaran), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan aparatur dinas sudah menjalankan tugas dan kewajiban dalam menyediakan tempat sampah dan TPS di setiap pasar milik pemerintah kota

pekanbaru sesuai dengan peraturan dan SOP yang di buat oleh pemerintah kota pekanbaru.

Indikator Outcome (Hasil), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengelolaan sampah telah mengeluarkan aturan-aturan mengenai fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SOP yang ada. Dengan menjaga fasilitas yang telah di berikan ke setiap pasar maka fasilitas akan bisa digunakan dalam jangka panjang.

Indikator Benefit (Manfaat), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibidang pengelolaan sampah sudah sepenuhnya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh pedagang dan buruh kebersihan di pasar dan dengan memberikan sarana dan peasarana di pasar aparaturnya sudah menciptakan kenyamanan dan keamanan dipasar yang dikelola oleh pemerintah dikota pekanbaru.

Indikator Impact (Dampak), mereka menjawab Cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengelolaan sampah sudah cukup dengan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di pasar milik pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan jawaban yang dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparaturnya bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomo 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi pada Sarana dan Prasarana) yaitu “Terlaksana”. Hal ini dikareakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparaturnya bahwa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah

mengenai Sarana dan Prasarana pasar sudah optimal dalam memberikan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh pedagang dan buruh kebersihan dalam mengelola sampah yang ada di lingkungan pasar milik pemerintah kota pekanbaru.

Tabel V.26 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Buruh Kebersihan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah (studi padasarana dan prasarana pasar milik pemerintah kota pekabaru)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Input (Masukan)	2 (28,6%)	1 (14,3%)	4 (57,2%)	7
2	Output (Keluaran)	2 (28,6%)	3 (42,8%)	2 (28,6%)	7
3	Outcome(Hasil)	2 (28,6%)	3,5 (50%)	1,5 (21,3%)	7
4	Benefit (Manfaat)	2 (28,6%)	3,5 (50%)	1,5 (21,3%)	7
5	Impact (Dampak)	1 (14,8%)	2,5 (35,7%)	3,5 (50%)	7
	Jumlah	9	13,5	12,5	35
	Rata-rata	1,8	2,7	2,5	7
	Persentase	25,7%	38,6%	35,7%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2021

Dari tabel V.26 diatas rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada buruh kebersihan, mereka menjawab rata-rata berada pada kategori “Cukup Terlaksana”

Indikator Input (Masukan), mereka menjawab Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan menilai masih kurangnya cukupnya masukan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai Fasilitas seperti masih adanya gerobak sampah yang tidak layak dipakai lagi, mengenai SDM buruh angkut masih belum cukup optimal untuk mengangkut sampah sehingga lambat untuk menganggkut sampah yang ada dipasar.

Indikator Output (keluaran), mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan petugas kebersihan di pasar Labuh Baru, Simpang Baru, Agus Salim, Lima Puluh, Tengku Kasim sudah merasa cukup dengan fasilitas tersediannya tempat sampah yang ada di depan kios-kios pedagang tetapi masih ada di beberapa pasar seperti pasar Cikpuan dan Rumbai masih kurangnya kesadaran pedagang untuk meletakkan tempat sampah di depan kios.

Indikator Outcome (Hasil), mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan buruh kebersihan belum cukup mendapatkan hasil dari untuk menjaga fasilitas di pasar dan belum terpenuhi kebutuhan untuk para pedagang.

Indikator Benefit (Manfaat), mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan buruh kebersihan belum cukup dapat untuk menciptakan manfaat demi kenyamanan dan keamanan yang ada dipasar dan masih kurang cukup terciptannya kinerja dalam pengelolaan sampah.

Indikator Impact (Dampak), mereka menjawab Kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan buruh kebersihan merasa kurang terlaksana untuk mewujudkan kebersihan yang ada dilingkungan pasar.

Berdasarkan jawaban yang dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi buruh kebersihan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomo 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi pada Sarana dan Prasarana) yaitu “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang eksternal yaitu buruh kebersihan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memang sangat penting untuk para buruh

kebersihan yang ada di beberapa pasar seperti pasar Cikpuan, Labuh Baru, Simpang Baru, Agus Salim Lima Puluh, Rumbai, dan Tengku Kasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah mengenai fasilitas sarana dan Prasarana dipasar. Hal ini dapat belum cukup membantu buruh kebersihan dengan kinerja aparaturnya mengenai sarana dan prasarana yang ada dipasar.

Tabel V.27 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pedagang Terhadap Sarana dan Prasarana Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Input (Masukan)	17,5 (35%)	18,5 (37%)	14 (28%)	50
2	Output (Keluaran)	19,5 (39%)	16 (32%)	14,5 (29%)	50
3	Outcome(Hasil)	22,5 (45%)	14,5 (29%)	13 (26%)	50
4	Benefit (Manfaat)	24,5 (49%)	10,5 (21%)	15 (30%)	50
5	Impact (Dampak)	13,5 (27%)	12,5 (48%)	24 (25%)	50
	Jumlah	97,5	72	80,5	250
	Rata-rata	19,5	14,4	16,1	50
	Persentase	39	28,8	32,2	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2021

Dari tabel V.24 diatas rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada pedagang, mereka menjawab rata-rata berada pada kategori “ Terlaksana”

Indikator Input (Masukan), mereka menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan pedagang belum cukup merasa ada masukan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai pengelolaan sampah seperti masih belum ada gerobak sampah yang tidak layak dipakai lagi.

Indikator Output (keluaran), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan pedagang sudah merasa puas dengan apa yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai pengelolaan sampah seperti tersediannya tempat sampah di setiap pasar dan TPS permanen yang dibangun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk menampung sampah di pasar. Tetapi masih ada pasar yang belum ada TPS permanen di karnakan kawasan dan

Indikator Outcome (Hasil), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan pedagang sudah berhasil untuk menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang di berikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan mereka sudah merasa terpenuhi dengan fasilitas yang diberi.

Indikator Benefit (Manfaat), mereka menjawab Terlaksana. Hal ini dikarenakan pedagang sudah merasakan manfaat dari keamanan dan kenyamanan yang ada dipasar dan kinerja dalam pengelolaan sampah belum cukup optimal.

Indikator Impact (Dampak), mereka menjawab Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakann pedagang merasakan dampak yang diberikan untuk mewujudkan kebersihan dilingkungan pasar kurang terlaksanakan dan peningkatan sarana dan prasarana belum kurang meningkat.

Berdasarkan jawaban yang dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi pedagang pasar bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru) yaitu “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang

external yaitu pedagang pasar bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dibidang pengelolaan sampah mengenai fasilitas sarana dan prasarana dipasar milik pemerintah kota pekanbaru sudah terlaksana tetapi masih adanya beberapa pasar seperti pasar Agus Salim dan Labuh Baru belum memiliki TPS yang permanen yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meletak tempat sampah di depan kios-kios mereka. Hal ini dapat mempergaruh kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah mengenai sarana dan prasarana belum cukup optimal untuk pengelolaan sampah di pasar.

D. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (studi pada Sarana dan Prasarana Sampah Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru)

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a) Belum adanya saknsi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di TPS pasar. Tempat sampah sementara yang seharusnya hanya untuk membuang sampah yang dihasilkan oleh pasar, dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga mereka dan hal ini dibiarkan begitu saja oleh pengelolaan sampah.

- b) Tidak adanya tempat sampah di depan kios-kios para pedagang membuat para pedagang harus mengumpulkan sampah mereka didepan kios mereka sendiri sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bertransaksi jual beli.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di TPS pasar merdeka yang bukan merupakan TPS untuk umum. Masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa TPS yang berada diwilayah pasar merdeka bukan merupakan TPS untuk umum tapi masyarakat tetap saja acuh dan membuang sampah di TPS tersebut dengan alasan TPS pasar merdeka merupakan TPS terdekat.
- d) Truk pengangkutan sampah yang terkadang tidak bisa datang untuk mengangkut sampah. dalam hal pengangkutan sampah dari TPS pasar mereka menuju TPS, pihak kantor unit Pasar belum mempunyai truk pengangkutan sampah sendiri dan masih bekerja sama dengan DKPP untuk menggunakan salah satu truk pengangkutan sampahnya. Namun terkadang truk tidak bisa datang untuk mengangkut sampah dikarenakan buruh pengangkut sampah masih kurang atau truk sedang mengalami kerusakan, jadi sampah di TPS pasar merdeka menumpuk sampai dua atau tiga hari.
- e) Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian kurang menanggapi serius kebutuhan yang diperlukan oleh Bidang Pasar. Terkadang kantor bidang pasar merdeka membutuhkan alat untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan di pasar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiannya dan analisis yang penulis lakukan, banyak yang penelitiannya berdasarkan lima indikator yaitu, Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat), Impact (Dampak). Maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi pada sarana dan prasarana sampah pasar milik pemerintah kota Pekanbaru) yaitu sebagai berikut :

1. Indikator Input (Masukan) berada pada kategori Cukup Terlaksana. Hal ini karena kurangnya pengelolaan sampah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, mengenai Sumber Daya Manusia yaitu masih kurangnya buruh angkut untuk mengangkut sampah yang ada di pasar.
2. Indikator Output (Keluaran) berada pada kategori Terlaksana. Hal ini karena mereka sudah melaksanakan pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam menyediakan tempat sampah dan TPS yang permanen, pasar yang tidak memiliki TPS yang permanen dikarenakan pasar tersebut belum memiliki lahan yang cukup untuk membangun TPS.

3. Indikator Outcome (Hasil) berada pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan Hasil dalam menjaga fasilitas dan sudah terpenuhi kebutuhan pedagang dan buruh kebersihan yang diberikan di setiap pasar.
4. Indikator Benefit (Manfaat) berada pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan aparatur dinas sudah memberikan sepenuhnya apa yang di perlukan pedagang dan buruh kebersihan dalam pengelolaan sampah yang ada di pasar milik pemerintah kota pekanbaru.
5. Indikator Impact (Dampak) berada pada kategori Kurang Terlaksana, hal ini dikarenakan aparatur dinas kurang partisipasi terhadap pedagang dan buruh kebersihan mengenai Sarana dan Prasarana di pasar milik pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu “ Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dilihat dari sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di bidang pengelolaan sampah dalam menyediakan Sarana dan Prasarana di pasar milik pemerintah kota pekanbaru sudah cukup terlaksanakan dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang pedagang dan buruh kebersihan sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada pedagang dan buruh kebersihan, hal ini juga agar dapat membantu pedagang dan buruh kebersihan

menjadi lebih tahu bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan sampah. Namun kegiatan pengelolaan sampah mengenai sarana dan prasarana belum berjalan dengan maksimalnya.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru meskipun kegiatan dalam pengelolaan sampah sudah terlaksana namun belum sesuai dengan tujuan awal pengelolaan tersebut yaitu menyediakan sarana dan prasarana, sebaiknya kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan kedepannya sejalan dengan tujuannya seperti memberika sarana dan prasarana pada pedagang dan buruh kebersihan pada setiap pasar milik pemerintah kota pekanbaru.
2. Kepada Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan agar kinerja menjadi optimal untuk bersama sama dapat memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan sampah
3. Sebaiknya dalam melaksanakan pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru agar ada partisipasi kepada pedagang dan buruh kebersihan setiap bulannya, agar pedagang dan buruh kebersihan merasa puas dengan kinerja pengelolaan sampah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru seperti meningkatkan Sarana dan Prasarana.
4. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah kedepannya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2011. Teori Dan Konsep Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung, Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi, (Ilmu Pemerintah Baru 1), Jakarta, Rineka Cipta.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Goodin, The Oxford Handbook of Public Policy (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Hardiyansyah. 2017. Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Haerul, akib,h& hamdan 2016. Imlementasi kebijakan program Makassar tidak rantasa dikota Makassar. Jurnal adm public, 6(2)
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, j. 2012. Kapita selekta teori administrasi negara. Bandung :puspaga.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J.. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.

- Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulberth. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Bar Algensindo.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Suyanto, Danang. 2013. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Thoha, m. 2012. *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta:raja grafindo persada.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105 Retri.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Winardi, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta Graha Ilmu.

Winardi. 2011. Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, Joko. (2009) Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang, Banyumedia.

Zulkifli, dan Moris. 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh PublishingUIR.

Zulkifli. 2013. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas kerja Mahasiswa. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal

Abdul Tahib, 2020. Manajemen pengelolaan pasar cikpuan kota pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang ditinjau dari perseftif ekonomi islam.

Jery nov pratama, 2016. Tata kelola sampah dikota pekanbaru (studi kasus pada bank sampah dikota pekanbaru tahun 2016).

Martinus triastantra, 2016. Pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah (studi kasus pasar giwangan kota Yogyakarta).

Syukron Zamzami, 2015. Studi sosiologi tentang pengelolaan kebersihan pada pasar tradisional dikota pekanbaru (studi kasus dipasar cikpuan, pasar pagi Dupa dan pasar pagi sail).

Dokumen

Undang- undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Undang – undang no 07 tahun 2014 tentang perdagangan.

Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
جامعة الإسلام الريان

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62781674614 Fax: +62781674634 Email: fakpol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 383/IA_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : NAYA FARISYA
Npm : 177110297
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
8 Tahun 2014 (Studi Pada Sama Dan Prasarana Pasar Milik Pemerintah Kota
Pekanbaru.
Persentase Plagiasi : 22 % (142 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan I, Akademik


Indra Patri S. Sos., M.Si
NPK. 970702230